

SOSIOLOGI WANITA

Gender & Ketenagakerjaan

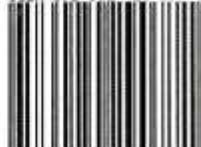
Berbagai macam proses perubahan yang terjadi dalam keluarga, salah satunya adalah perubahan peran dalam keluarga. Pemahaman masyarakat pada umumnya selama ini bahwa laki-laki adalah tulang punggung ekonomi keluarga, sebagai pencari nafkah yang utama, sekarang sudah tidak dapat lagi menjadi sesuatu yang berlaku umum. Sebab banyak perempuan yang dapat dijumpai dalam masyarakat yang juga mampu berperan sebagai pencari nafkah. Bisa jadi penghasilan yang diperoleh lebih besar dari penghasilan suaminya. Atau mungkin menjadi penghasilan satu-satunya untuk menghidupi keluarga, terutama bagi perempuan yang menjalankan peran sebagai *single parent*.

Menjalankan peran ganda merupakan hal yang baik terutama perempuan kelas bawah. Bekerja di luar rumah sambil mengurus anak, serta menyelesaikan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi masalah. Baik yang mempunyai suami ataupun yang tidak tetap, mereka tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja mencari nafkah menjadi keharusan.

Penerbit Pena Indis

Office:
 Jl. Renvile RT2/RWS, Desa Pejagan,
 Kec. Pejagan, Kab. Kebumen - Jawa Tengah
 No. Hp: 082113883662
 Email: pena_indis@yahoo.co.id
 Facebook: Pena Indis

ISBN 978-602-429-077-1



9 786024 290771

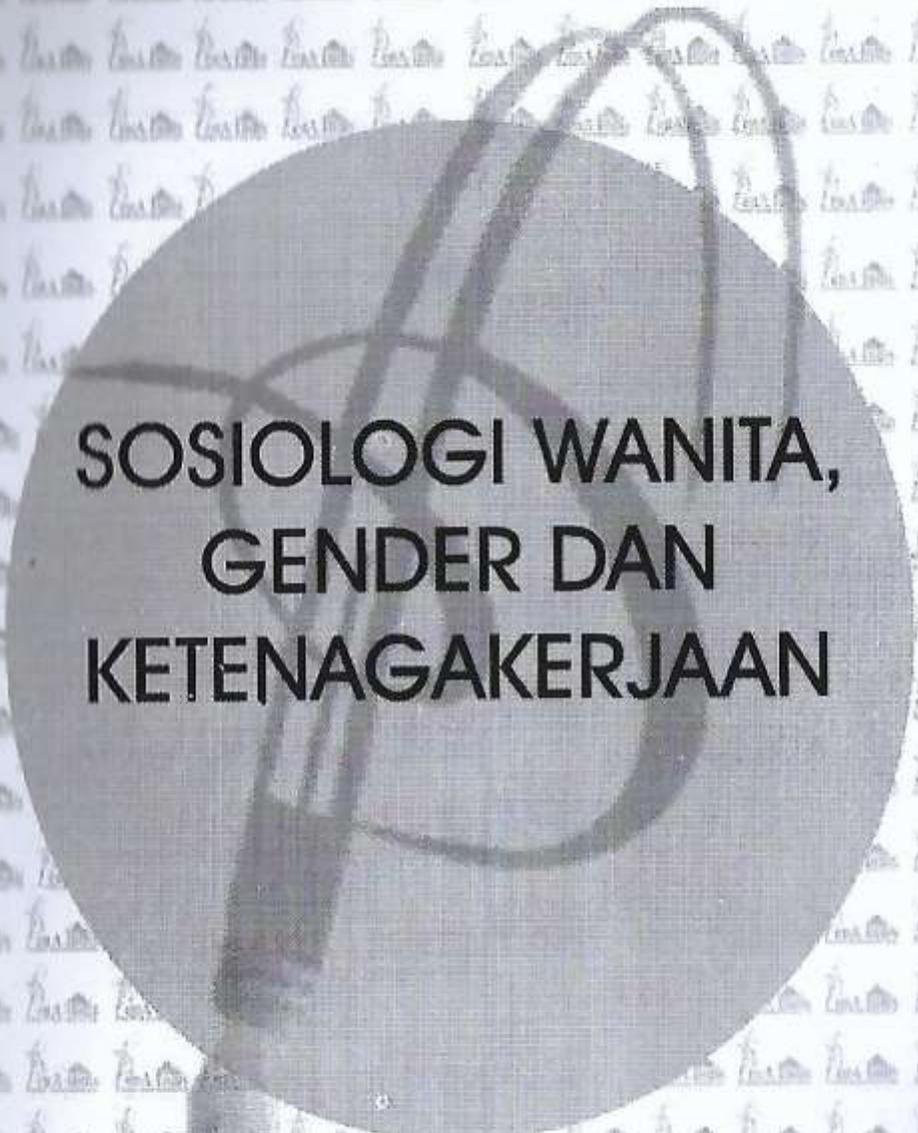


Dr. Asmirah, M.Si.

SOSIOLOGI WANITA

Gender & Ketenagakerjaan

Editor: Harfuddin Halim



SOSIOLOGI WANITA, GENDER DAN KETENAGAKERJAAN

Dr. Asmirah, M, Si.

**CV. Pena Indis
2017**

Semoga kehadiran buku ini memberi nilai tambah, dan bahkan dapat menyentil siapapun untuk membuat karya yang lebih baik.

Terimakasih pada semua yang telah menjadi bagian dalam proses penerbitan karya ini, semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Amiin!!!!

Penulis,

Asmirah

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis

- 1- Prolog: Perempuan & Ketidakadilan _1
 - A. Marginalisasi Perempuan _11
 - B. Subordinasi Perempuan _13
 - C. Stereotipe Perempuan _15
 - D. Kekerasan Perempuan _20
 - E. Kemitraan, Kemitra-sejajaran, Kemitraan Terpadu _25

- 2- Konsep-Konsep Dalam Relasi Perempuan _41
 - A. Patriarki _41
 - B. Ideologi Gender _49
 - C. Marginalisasi _57
 - D. Domestikasi _60
 - E. Pengiburumahtanganan _62

- 3- Berbagai Perspektif Perempuan _64
 - A. Feminisme Liberal _73
 - B. Feminisme Marxis _77
 - C. Feminisme Sosialis _82
 - D. Teori Perbedaan Gender _84
 - E. Teori Ketimpangan Gender _87
 - F. Teori Penindasan Gender _88
 - G. Teori Penindasan Struktural _91

- 4- Teori Ilmu Sosial Untuk Analisis Perempuan_94
 - A. Teori Struktural Fungsional_95
 - B. Teori Konflik_99
 - C. Teori Sistem Sosial_103
 - D. Teori Maslow_111
 - 5- Perubahan Sosial dan Agen Perubahan_115
 - A. Perubahan Sosial dan Agen Perubahan dalam Kerja Perempuan_115
 - B. Konsep Modern Tentang Agen Perubahan_126
 - 6- Perempuan dan Tindakan Rasional_132
 - A. Teori Pilihan Rasional_141
 - B. Analisis Teori Jaringan Sosial_143
 - C. Fenomenologi_148
 - D. Postmodern_152
 - 7- Perempuan, Kerja dan Dagang Asongan_160
 - A. Perempuan Pekerja_160
 - B. Perempuan di Sektor Informal_164
 - C. Migrasi dan Kerja_190
 - D. Pedagang Asongan_198
 - 8- Epilog_208
- DAFTAR PUSTAKA_214
RIWAYAT HIDUP_221

1 Prolog: Perempuan & Ketidakadilan

Persoalan gender adalah isu penting karena menjadi kajian yang memasuki wilayah setiap analisis kehidupan sosial, selalu menjadi wacana dalam mengkaji tentang perubahan sosial, bahkan dijadikan topik utama ketika perubahan yang terjadi dalam masyarakat dihubungkan dengan pembangunan sosial kemasyarakatan. Sehubungan dengan gender dibahas pula mengenai ketidakadilan, ketidakberuntungan,

1**Prolog: Perempuan & Ketidakadilan**

Persoalan gender adalah isu penting karena menjadi kajian yang memasuki wilayah setiap analisis kehidupan sosial, selalu menjadi wacana dalam mengkaji tentang perubahan sosial, bahkan dijadikan topik utama ketika perubahan yang terjadi dalam masyarakat dihubungkan dengan pembangunan sosial kemasyarakatan. Sehubungan dengan gender dibahas pula mengenai ketidakadilan, ketidakberuntungan,

penindasan, serta diskriminasi terhadap kaum perempuan yang berlangsung disemua belahan dunia dalam sektor kehidupan manusia yaitu tingkat internasional, dalam suatu negara sosial kemasyarakatan, budaya, ekonomi yang semuanya berlangsung sampai pada unit sosial yang paling kecil yakni keluarga.

Kehidupan perempuan dalam kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari laki-laki sebab dalam struktur sosial keberadaan laki-laki dan perempuan adalah sama-sama penting. Adapun masalah yang dihadapi oleh perempuan tidak dapat lepas dari keberadaan laki-laki, sebab secara biologis kedua jenis kelamin tersebut berbeda dan tetap, namun dalam perwujudan hubungan relasi gender laki-laki dan perempuan memang peran gender juga berbeda, tetapi dapat berubah atau dapat saling dipertukarkan menurut konstruksi sosial budaya masyarakat tempat

mereka berada. Pengaruh lingkungan sosial budaya memberikan warna terhadap pengetahuan dan perilaku warga masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan norma-norma atau nilai-nilai yang ada pada masyarakat tersebut. Konsep gender tidak bersifat universal, dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta dapat pula berbeda karena perubahan waktu.

Meskipun konsep gender tidak bersifat universal, menurut Susilowati dalam Sulaeman & Homzah (2010:14) bahwa hierarki gender bersifat universal sebab posisi perempuan dalam masyarakat selalu tersubordinasi oleh laki-laki. Berbagai budaya masyarakat menunjukkan posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki. Menurut Moore dalam Sulaeman & Homzah (2010:15) bahwa berbagai lintas budaya menunjukkan kalau perempuan berada posisi subordinat dari laki-

laki sehingga dirasakan adanya ketimpangan dalam perwujudan relasi gender. Selanjutnya menurut Bemmelen dalam Sulaeman & Homzah (2010:15) bahwa menggunakan konsep gender juga mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, khususnya mengenai ketimpangan gender. Ketimpangan gender tersebut perlu dikaji lebih mendalam, dicari akar penyebabnya sebab bisa saja sudah berpola secara berakar dalam hubungan-hubungan gender antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender terjadi sehingga disebut sebagai subordinasi. Oleh karena subordinasi tidak dapat dijelaskan oleh konsep perbedaan jenis kelamin sehingga penjelasan dilakukan dengan menggunakan konsep gender.

Berbagai kasus yang dialami oleh perempuan yang berdimensi kekerasan secara fisik, sosial, bahkan dalam bentuk gagasan telah memberi gambaran yang jelas bahwa

terdapat dominasi bahkan ketimpangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang menjalankan peran ganda merasakan dilematis dalam menjalankan perannya. Beban tambahan harus dijalankan selain beban peran reproduktif, namun biasanya peran yang tidak memberi jaminan keselamatan baginya terutama yang bekerja di luar rumah.

Dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari akan semakin bertambah banyak perempuan yang berperan ganda. Hal ini terjadi karena tuntutan ekonomi rumah tangga sehingga mereka bekerja mencari nafkah serta memenuhi kepuasan bathin karena menikmati pekerjaan serta hasil dari pekerjaannya. Semakin membaik tingkat pendidikan perempuan merupakan salah satu indikator semakin bertambahnya jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah. Selain tingkat pendidikan terdapat aspek lain yang

mendorong perempuan untuk bekerja mencari nafkah, yakni adanya pandangan bahwa bekerja mencari nafkah adalah wujud nyata partisipasi perempuan menjalankan perannya. Bekerja di luar rumah bagi sebagian perempuan adalah bertujuan untuk mencari nafkah sebagai penopang ekonomi keluarga. Dan ada pula yang berkerja karena dengan bekerja dianggap sebagai kesempatan untuk mengekspresikan diri di lingkungan sosial serta dapat menjalin komunikasi dengan dunia luar. Menjalankan tugas rutin dalam rumah dapat menimbulkan kebosanan bahkan tidak sedikit yang merasa sakit secara psikis. Sepanjang masih sanggup menjalankan peran secara seimbang antara keluarga dan di luar rumah, hal tersebut tidak mengganggu satu sama lain.

Menjalankan peran ganda merupakan hal yang baru terutama perempuan kelas bawah. Bekerja di luar rumah sambil

mengasuh anak serta menyelesaikan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi masalah. Baik yang mempunyai suami ataupun yang tidak tetap, mereka tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja mencari nafkah menjadi keharusan. Bahkan terpaksa menjalankan pekerjaan tanpa pertimbangan yang matang demi sesuap nasi. Lapangan kerja terbatas, tingkat pendidikan yang kurang memadai menyebabkan tidak ada pilihan bagi perempuan. Sehingga kesan “terpaksa bekerja” menjadi hal yang umum dijumpai pada perempuan kelas bawah.

Masalah keamanan dan kenyamanan bagi perempuan yang bekerja di luar rumah menyebabkan perempuan kurang bebas bahkan mengalami hambatan dalam beraktifitas. Laki-laki yang diharapkan jadi pelindung apabila bepergian justru dapat menjadi ancaman bagi keselamatan

perempuan. Tanpa hambatan pun perempuan sebenarnya sudah banyak mengalami hambatan yang lain, karena harus meninggalkan tugas pokoknya dalam rumah tangganya.

Perlakuan diskriminasi dapat ditemukan di tempat kerja pada jenis pekerjaan apa saja. Perempuan dianggap tidak pantas ditempatkan pada posisi penting, upah yang diperoleh lebih rendah daripada laki-laki meskipun mempunyai tingkat pendidikan yang sama. Pendidikan yang bagi perempuan belum menjamin dapat memperoleh pekerjaan dengan posisi yang sama dengan laki-laki. Meskipun perempuan meraih pendidikan yang tinggi masih terjadi segmentasi dalam pasar tenaga kerja yang menyebabkan tidak mudah bagi perempuan menempati posisi strategis di tempat kerja.

Pada sektor industri biasanya perempuan ditempatkan pada bidang yang

produktivitasnya rendah. Perempuan dianggap kurang terampil dan kurang rasional sehingga ditempatkan pada pekerjaan dengan upah yang rendah. Pada saat perusahaan mengalami masalah, pekerja perempuan yang menjadi sasaran utama akan kehilangan pekerjaan karena dianggap tidak atau kurang produktif.

Perempuan lebih sering kurang beruntung karena kalah bersaing dari laki-laki untuk mendapatkan peluang kerja. Umumnya perusahaan berpendapat bahwa mempekerjakan laki-laki akan lebih baik daripada mempekerjakan perempuan, sebab laki-laki dalam bekerja lebih leluasa dalam mengatur waktu sehingga bisa lembur tanpa batas waktu. Pekerja perempuan lebih banyak menggunakan waktu untuk mengurus keluarga sehingga dianggap kurang produktif. Hal ini yang sering menyebabkan perempuan

kalah bersaing dengan laki-laki dalam pasar tenaga kerja.

Kasus pelecehan seksual sering tidak dapat dihindari oleh perempuan di tempat kerja. Perempuan sebagai bawahan tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi diri. Takut resiko dikeluarkan dari pekerjaannya serta tidak adanya perlindungan yang tegas menyebabkan perempuan biasa mengalami kekerasan.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan hampir terjadi pada semua tempat kerja. Terutama bagi perempuan kelas bawah paling banyak mengalami hal tersebut. Wujud nyata hal yang dilakukan sebagai pelindung serta memberi kekuatan kepada perempuan belum optimal. Sebab sampai saat ini masih sering dijumpai berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan fisik, kekerasan sosial, serta kekerasan ideologis. Kekerasan ideologis paling banyak dialami di

tempat kerja sebab seringkali menempatkan pekerja perempuan sebagai “kelas dua” walaupun memiliki potensi tidak kalah dengan yang dianggap “kelas satu”. Perempuan sering diberi label sebagai kurang mampu, atau kurang mandiri dibandingkan pekerja laki-laki. Sehingga mereka lebih banyak berada pada posisi yang terbelakang dan terkesan selalu menjadi pihak yang harus tergantung pada laki-laki.

A. Marginalisasi Perempuan

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan ketidakadilan sebab perempuan mengalami proses marginalisasi yang pada akhirnya membuat perempuan berada pada kondisi miskin. Berbagai bentuk marginalisasi yang dialami oleh perempuan akibat perbedaan gender. Proses marginalisasi perempuan dapat terjadi di dalam rumah tangga, ditempat kerja,

masyarakat, dalam budaya, sampai kepada hal yang berskala lingkup negara.

Perempuan yang mengalami marginalisasi di luar rumah tangga biasanya diartikan sebagai:

- a. Proses pengucilan (*exclusion*) yang dialami oleh perempuan ditempat kerja yang memperoleh penghasilan berupa uang,
- b. Proses pergeseran ke pinggiran (margins) yang dialami oleh perempuan yang bekerja pada jenis pekerjaan tidak stabil, upah rendah, serta mereka dinilai tidak terampil,
- c. Proses feminisasi atau segregasi yang memfokuskan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu sehingga menjadi label pekerjaan perempuan, serta pemisahan jenis pekerjaan tertentu khusus untuk laki-laki dan khusus untuk perempuan,

- d. Proses ketimpangan ekonomi yang menyangkut ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan, dalam Maria E. Pandu (2006:54).

B. Subordinasi Perempuan

Pandangan gender yang terbentuk berdasarkan anggapan yang ada dalam masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya subordinasi terhadap kaum perempuan. Menurut Fakih dalam Maria E. Pandu (2006:55) bahwa anggapan-anggapan yang biasa dijumpai dalam masyarakat yang menyebabkan perempuan tersubordinasi yaitu bahwa perempuan tidak rasional dalam berpikir, emosional, tidak mampu memimpin sehingga ditempatkan pada posisi yang tidak strategis.

Berbagai bentuk subordinasi yang dialami oleh perempuan dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu antara lain:

1. Menurut Fakih dalam Maria E. Pandu (2006:55) bahwa anak laki-laki diberikan prioritas untuk melanjutkan pendidikan sebab bagaimanapun tingginya tingkat pendidikan anak perempuan pada akhirnya ke dapur saja.

Pekerjaan “produksi” dilekatkan pada laki-laki sebagai jenis pekerjaan yang menjadi kekuasaannya. Adapun pekerjaan “reproduksi” yang biasa menjadi pekerjaan perempuan dianggap rendah sehingga menjadi subordinasi dari pekerjaan “produksi”.

2. Menurut Rahman dalam Muthali'in yang ditulis oleh Maria E. Pandu (2006:55) bahwa perempuan dianalogikan sebagai gelas kaca dan kayu bakar. Bahwa perempuan yang akan mengalami peristiwa pecah dan retak serta dapat dibakar sehingga menjadi debu. Analogi tersebut yang diberikan kepada perempuan

menggambarkan betapa rawan dan lemahnya posisi perempuan sehingga mudah mendapat perlakuan yang membahayakan serta merugikan dirinya. Pose tubuh perempuan yang merangsang dijadikan alat promosi produk barang. Demikian pula lowongan pekerjaan mensyaratkan bagi perempuan yang belum menikah serta kecantikan yang harus mereka miliki. Dan memang penggunaan kata wanita selain kata perempuan memiliki arti merelakan diri untuk diatur oleh suami dan senantiasa selalu melayani dan menyenangkan suami. Bahkan perempuan kalau ingin mengatur harus berdasarkan kehendak suaminya.

C. Stereotipe Perempuan

Menurut Narwoko dalam Suyanto (2005:342) bahwa yang dimaksud stereotipe adalah label yang diberikan kepada pihak

tertentu yang menimbulkan ketidakadilan pada pihak tersebut. Salah satu contohnya adalah adanya anggapan bahwa tugas seorang isteri adalah melayani semua kebutuhan suami di rumah, sehingga pendidikan bagi seorang perempuan dianggap tidak penting. Stereotipe yang bersumber dari pandangan gender tidak hanya terjadi dalam rumah tangga. Stereotipe mengenai perempuan juga dijumpai pada masyarakat, serta aturan formal yang berlaku di pemerintahan.

Mengenai stereotipe yang dihubungkan dengan perempuan yang bekerja mencari nafkah biasanya dihubungkan dengan posisi pada pekerjaan, umumnya sebagai pelayan atau dianggap sebagai pekerjaan membantu keluarga atau membantu suami.

Stereotipe merupakan gambaran mengenai sejumlah sifat serta harapan yang terdapat pada suatu kelompok atau unit sosial tertentu. Dapat pula diartikan sebagai

generalisasi sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang tertentu tanpa didukung oleh fakta objektif. Biasanya sifat cerewet dilekatkan pada perempuan. Padahal tidak semua perempuan memiliki sifat cerewet. Mungkin saja ada laki-laki yang cerewet bahkan lebih cerewet daripada perempuan.

Stereotipe biasanya menentukan cara seseorang memandang kelompok masyarakat tertentu atau cara berinteraksi dengan orang lain sebab stereotipe memberi arah pada perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Stereotipe yang dijumpai dalam masyarakat lebih banyak yang merugikan kaum perempuan sebab perempuan tidak dianggap setara dengan laki-laki. Mungkin saja di antaranya ada yang benar tetapi pada dasarnya menyesatkan, sebab betapa ketidakadilan banyak dialami oleh kaum perempuan.

Ada beberapa mengenai stereotipe yang ditujukan kepada perempuan sebagaimana menurut Muthali'in dalam Maria E. Pandu (2006:57) yaitu :

- a. Perempuan adalah makhluk pesolek yang berupaya memancing perhatian terutama laki-laki. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan yang merugikan perempuan sebagai akibat dari bersolek, maka masyarakat pada umumnya akan menyalahkan perempuan;
- b. Berapapun penghasilan yang diperoleh perempuan dari pekerjaannya, tetap dianggap sebagai penambah penghasilan suami atau dianggap bukan pekerjaan utama;
- c. Sebagai ibu rumah tangga adalah kodrat perempuan. Apabila bekerja di luar rumah dianggap tidak sesuai dengan kodratnya.

D. Beban Kerja Perempuan

Anggapan masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab pekerjaan domestik menyebabkan beban kerja perempuan menjadi ganda. Terutama perempuan dari kalangan miskin yang harus mencari nafkah juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya pada pekerjaan rumah. Bagi keluarga yang mempekerjakan serta mampu membayar gaji pembantu rumah tangga tidak akan merasakan beban kerja yang berat, tetapi beban kerja tersebut akan dijalankan oleh pembantu yang menjadi korban bias gender. Dan hampir semua pembantu rumah tangga dijalankan oleh perempuan. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga bagi perempuan adalah beban berat, apalagi pekerjaan rumah tangga juga harus menjadi tanggung jawabnya. Padahal penghasilan yang

diperolehnya belum tentu mencukupi kebutuhan kehidupan dirinya serta keluarganya, terutama bagi yang menerima upah yang rendah.

Pandangan mengenai pekerjaan perempuan dianggap rendah sebagai penyebab upah kerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini sudah dianggap wajar dan dapat diterima dalam masyarakat sebab sudah tersosialisasikan sejak lama tanpa ada perbaikan karena tidak dianggap salah.

D. Kekerasan Perempuan

Fenomena kekerasan dapat terjadi terhadap kaum laki-laki juga pada kaum perempuan. Namun isu kekerasan terhadap perempuan semakin menonjol. Informasi mengenai hal tersebut dapat diperoleh dari pemberitaan media massa juga dari berbagai hasil penelitian. Ketimpangan gender yang masih kuat bahkan mengakar masih tumbuh

berlangsung terus pada masyarakat menyebabkan posisi perempuan masih rentan terhadap tindak kekerasan.

Menurut Pasal Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sulaeman dan Homzah (2010:1) bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) adalah segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender berupa tindakan fisik, seksual, maupun emosional yang menyebabkan perempuan mengalami penderitaan. Yang termasuk dalam tindak kekerasan adalah segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak perempuan yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.

Kekerasan berbasis gender memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki dan selanjutnya laki-laki berhak untuk mengontrol perempuan. Laki-laki menempatkan diri yang mengendalikan identitas gender perempuan.

Identitas gender merupakan perasaan subjektif tentang seseorang mengenai dirinya atau dapat pula disebut konsep diri seseorang.

Kekerasan yang biasa dialami oleh perempuan dalam keluarga biasanya bersifat eksploitasi dan dominasi. Oleh karena kontrol urusan rumah tangga ada pada suami sehingga suami dapat melakukan kekerasan secara fisik juga psikologis. Adapun kekerasan yang biasa terjadi pada struktur sosial yang ada hubungan dengan status dan peran perempuan dalam masyarakat, biasanya perempuan tidak berpeluang menduduki jabatan tertentu karena alasan perbedaan jenis kelamin, bukan berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Kekerasan yang bersumber pada anggapan gender disebut juga *gender related violence*, yang terjadi karena ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat. Adapun berbagai macam kekerasan yang

dialami oleh perempuan di dalam keluarga atau di masyarakat seperti perkosaan dalam perkawinan yang terjadi dalam rumah tangga, prostitusi atau pelacuran dalam masyarakat, kekerasan dalam bentuk pornografi dan pelecehan seksual.

Menurut Supangkat dalam Sulaeman dan Homzah (2010:23) bahwa perempuan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi bukan gejala sosial yang baru. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi semakin bertambah dari waktu-waktu. Bekerja sebagai pedagang bagi perempuan yang sebagian besar ibu rumah tangga adalah terutama untuk memenuhi kebutuhan subsistem. Perempuan sebagai bagian dalam struktur sosial melakukan aktivitas ekonomi mengalami perubahan, sebab telah ada pembagian kerja dengan laki-laki. Perubahan tersebut secara jelas menunjukkan hak-hak laki-laki dan juga perempuan. Apabila terjadi

pelanggaran akan mendapat sanksi berupa kekerasan, yakni kekerasan fisik juga kekerasan psikologis. Perempuan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi akan memberi sumbangan terhadap “lingkungan domestik” sebagai sumber daya dalam sistem produksi dan distribusi. Namun sering terjadi perempuan mengalami ketimpangan gender yang tidak dapat memutuskan sendiri keinginannya untuk bekerja sebab harus persetujuan kehendak suami yang sangat tidak berpihak kepada isteri karena beban yang harus di emban adalah tugas domestik. Bekerja di luar rumah biasa bukan karena keinginannya, tetapi terpaksa dilakukan karena tidak ada pilihan lain.

Ketika perempuan selalu bergantung pada kehendak suami berarti perempuan akan selalu tersubordinasikan sehingga merasa sangat terdiskriminasikan. Tidak ada ruang yang memberi kesempatan kepada perempuan

untuk menentukan keinginannya sendiri, sehingga terjadi kekerasan bukan hanya secara fisik tetapi juga hak-hak mereka terampas untuk bekerja menurut keinginannya, kehilangan kekuasaan untuk memperoleh penghasilan sendiri yang juga dapat membantu keluarganya, kehilangan kesempatan untuk dapat berinteraksi dengan teman-temannya, bahkan kehilangan untuk dapat memperoleh kebutuhan sosial pada umumnya. Rasa tidak nyaman karena tidak berdaya untuk eksis dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan sosialnya.

E. Kemitraan, Kemitra-Sejajaran dan Kemitraan Terpadu

Konsep kemitraan yang biasa digunakan di masyarakat pada umumnya berhubungan dengan aktifitas bisnis. Para pebisnis bermitra antara dua orang atau lebih dalam menjalankan bisnis. Bermitra dalam bisnis

boleh juga tidak berada pada posisi yang sama, ada yang mendominasi terhadap yang lainnya. Mungkin dalam kepemilikan modal usaha tidak seimbang sehingga dalam bisnis yang dijalankan ada yang bertindak lebih kuat atau lebih berkuasa, bahkan menguasai terhadap yang kurang memiliki akses sumber daya. Ketika kemitraan dihubungkan dengan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, semakin menarik untuk dibahas sebab konsep tersebut dianalogikan dari hubungan kerja yang terdapat pada aktifitas bisnis kepada hubungan sosial dalam keluarga serta masyarakat. Tentu saja terjadi ketimpangan sebab ukuran yang digunakan dalam bisnis tidak melihat hubungan sosial, sementara dalam hubungan sosial ada hal yang spesifik untuk menjadi pertimbangan dalam keputusan yang bertentangan dengan tujuan bisnis. Kecuali menerapkan tanggung jawab sosial bisnis. Sehingga ada kemitraan

yang menghubungkan pemikiran atas pemikiran atas dasar ekonomi dengan pemikiran karena pertimbangan sosial.

Selanjutnya konsep kemitraan berkembang menjadi kemitra-sejajaran. Sebagaimana menurut Wijaya dalam Maria E. Pandu (2006:70) bahwa konsep kemitra-sejajaran pada mulanya diungkapkan pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perempuan yang dikenal sebagai "*United Nation Decade For Women*" (1975-1985) yang bertujuan untuk "*The Integration and participation of Women in Development as Equal Partners*".

Kemitra-sejajaran (*equal partner*) fokus pada kondisi perempuan di dunia yang kedudukannya rendah pada berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Sehingga konsep kemitra-sejajaran dimasukkan dalam strategi pembangunan termasuk di Indonesia. Konsep Kemitra-sejajaran di Indonesia mulai

diungkapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 meskipun tidak secara eksplisit, bahwa “wanita mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dengan pria dalam segala bidang pembangunan”. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep kemitraan.

Selanjutnya secara eksplisit dalam GBHN tahun 1993 dikemukakan bahwa “wanita mempunyai hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan disegala bidang”.

Kemudian lebih ditegaskan lagi dalam GBHN tahun 1998 bahwa :

“Wanita adalah mitra sejajar pria, baik sebagai perencana dan pelaksana pembangunan maupun sebagai pengambil keputusan, penerus kebijaksanaan dan pemanfaat hasil pembangunan. Agar wanita dapat memberi sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa, kualitas dan kedudukan mereka dalam keluarga harus ditingkatkan serta didukung oleh keluarga masyarakat sendiri”.

Wujud nyata Kemitra-sejajaran antara laki-laki dan perempuan atau suami dengan isteri dapat terjadi apabila didasarkan kepada keadilan dan kesetaraan hubungan sosial diantara laki-laki dan perempuan dalam keluarga atau di luar rumah tangga seperti di bidang ekonomi atau di bidang politik. Kemitra-sejajaran menginginkan persamaan hak, kedudukan, peran, kewajiban, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.

Meskipun sudah didukung oleh amanat GBHN bahkan deklarasi PBB, masih saja menimbulkan berbagai masalah yang lebih banyak merugikan perempuan. Sehingga konsep Kemitra-sejajaran lebih disempurnakan ke konsep kemitraan terpadu.

Dalam kemitraan terpadu ditekankan bahwa yang menjadi tujuan utama adalah dapat tercipta keserasian untuk mencapai suatu keteraturan sosial. Suami tidak selalu harus menjadi pencari nafkah. Kepemilikan

suami dan istri dapat disatukan untuk menjadi kekuatan. Isteri tidak harus selalu tergantung pada suami. Keterpaduan dan keserasian antara kekuatan yang dimiliki oleh suami dan isteri merupakan kunci pokok kelangsungan kemitraan tersebut. Keluarga harus dapat mewujudkan kemitraan tersebut sebagai dasar terciptanya kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan melalui kemitraan yang terpadu dan serasi sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Untuk mewujudkan kemitraan terpadu yang harmonis antara laki-laki dan perempuan harus saling mendukung satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Dukungan yang dimaksud adalah perilaku saling menghargai atau saling menghormati, saling membutuhkan, saling membantu, serta saling peduli serta saling pengertian sampai pada kondisi tidak ada pihak yang merasa

dirugikan atau tidak beruntung. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat terutama kaum perempuan. Sehingga perlu campur tangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan sebagai strategi yang dapat menjangkau ke semua lapisan masyarakat serta seluruh instansi pemerintah juga swasta, masyarakat perkotaan juga masyarakat pedesaan.

Selanjutnya dibuat strategi yang tertuang di dalam Instruksi Presiden (INPRES) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Secara operasional yang dimaksud pengarusutamaan gender adalah upaya untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Terdapat empat aspek yang selalu dipertimbangkan yaitu peran, akses, manfaat,

dan kontrol. Empat aspek tersebut seharusnya selalu setara dan adil antara laki-laki dan perempuan.

Pengarusutamaan gender harus dilaksanakan diseluruh aspek kehidupan masyarakat sampai pada kehidupan keluarga supaya dapat memberi hasil yang lebih memuaskan. Strategi pengarusutamaan gender mempercepat mewujudkan kesetaraan keadilan gender.

Tentang pembangunan yang semakin kompleks tidak hanya karena persoalan internal, tetapi juga pengaruh globalisasi yang tidak dapat dihindari serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak berpengaruh dalam masyarakat. Menghadapi tantangan yang tidak mudah tentu harus mempersiapkan sumberdaya yang handal, sehat, cerdas, produktif, dan mandiri. Oleh sebab itu Indonesia menjadikan kebijakan pengarusutamaan gender sebagai salah satu

strategi dalam pemberdayaan sumber daya manusia.

Menurut Moerpratomo dalam Maria E. Pandu (2006:78) dijelaskan bahwa program pengarusutamaan gender yang ditujukan kepada perempuan dalam rangka untuk; (1) meningkatkan keterjangkauan dan penguasaan wanita kepada manfaat pembangunan; (2) meningkatkan kesadaran wanita tentang diskriminasi gender yang disebabkan oleh sistem sosial; (3) meningkatkan partisipasi aktif wanita dalam pengambilan keputusan yang terjadi dalam keluarga juga dalam masyarakat; (4) pemberdayaan wanita menjadi mandiri dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis.

Adapun pemberdayaan yang ditujukan kepada laki-laki bertujuan untuk; (1) meningkatkan kesadaran laki-laki bahwa memperlakukan wanita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa kelas dua adalah tidak

sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan juga pandangan islam; (2) supaya laki-laki menghargai perempuan dan menempatkannya sebagai mitra sejajar; (3) membebaskan laki-laki dari peran yang dianggapnya menurut stereotipe.

Demikian pula kebijakan pengarusutamaan gender ada yang ditujukan kepada masyarakat yang bertujuan untuk; (1) supaya masyarakat memberi hak dan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk mengembangkan diri dan berperan dalam pembangunan serta menikmati hasil pembangunan; (2) supaya perempuan diberi akses yang sama terhadap sumber dan manfaat pembangunan; (3) menyeimbangkan beban kerja laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat; (4) meningkatkan kedudukan dan peran perempuan serta melindungi peran kodrati perempuan.

Mengenai manfaat dari pengarusutamaan gender di Indonesia adalah sebagai berikut; 1) pemerintah menetapkan kebijakan yang adil dan responsif gender bagi perempuan dan laki-laki; 2) kebijakan yang adil dan responsif gender akan bermanfaat secara adil bagi semua rakyat; 3) pengarusutamaan gender merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh kesempatan yang sama, pengakuan yang sama, serta penghargaan yang sama di masyarakat; 4) pengarusutamaan gender mengarah kepada kesetaraan gender; 5) pengarusutamaan gender memperkuat kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu bangsa.

Selama masa dekade perempuan (1975-1985) upaya pemberdayaan perempuan dikenal sebagai perempuan dalam pembangunan yang berlangsung di negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia.

Kemudian hasil atau manfaat bagi perempuan dari upaya tersebut di evaluasi yang dilakukan pada Konfrensi Perempuan Internasional di Nairobi Tahun 1985. Evaluasi dilakukan sebab masih ditemukan ketidakadilan serta eksploitasi dalam proses pembangunan itu sendiri. Juga masalah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Bukan hanya perempuan yang akan mengalami keterbelakangan. Laki-laki pun akan mengalaminya apabila tidak diberdayakan dan tidak diberi kesempatan untuk berkreasi sesuai potensi yang dimilikinya. Sehingga pemerintah mempromosikan pengarusutamaan gender sebagai strategi yang melibatkan perempuan dalam proses pembangunan.

Mengacu pada hasil konfrensi Nairobi pada Tahun 1985 yang mengganti konsep integrasi menjadi konsep pengarusutamaan gender sebagai strategi pemberdayaan

perempuan, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu sebab ketertinggalan perempuan karena konsep pembangunan yang tidak menempatkan perempuan sama dengan posisi laki-laki pada umumnya dalam aktifitas pembangunan terutama pada penetapan kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan.

Menurut Rogers dalam Maria E. Pandu (2006:81) bahwa konsep pembangunan yang mengutamakan laju pertumbuhan ekonomi berlangsung pada tahun 1960-an sampai tahun 1970-an. Pada akhir tahun 1970-an konsep pembangunan tersebut dianggap tidak sesuai dengan negara berkembang, sebab lahirnya konsep tersebut dilatarbelakangi oleh kejadian-kejadian yang terjadi di negara barat yang dianggap sebagai negara maju. Konsep pembangunan negara maju menekankan industrialisasi, teknologi padat modal, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adapun

untuk negara berkembang perlu membenahi faktor internal masyarakat sebagai penyebab keterbelakangan, seperti cara berpikir dan bertindak yang tradisional. Perlu melakukan perubahan dalam masyarakat, menanamkan nilai-nilai yang berorientasi ke depan yang lebih baik serta kepercayaan diri untuk menuju pada kondisi modernisasi. Sehingga berbagai pemikiran digunakan untuk diaplikasikan di berbagai negara-negara berkembang sebagai unsur-unsur baru yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat. Unsur-unsur yang dimaksud sebagai berikut; (1) sasaran utama dalam pembangunan adalah penduduk desa dan orang miskin di kota untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi serta pemerataan penyebaran informasi; (2) partisipasi seluruh masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; (3) mandiri dalam membangun keluarga dan masyarakatnya berdasarkan

potensi sumber daya yang dimilikinya; (4) memadukan sistem tradisional dan modern untuk modernisasi sebagai pertimbangan yang dapat berbeda menurut masing-masing daerah.

Oleh sebab itu konsep pembangunan tidak lagi menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi mengutamakan kemajuan di bidang sosial, terciptanya persamaan serta kebebasan. Dengan demikian yang dimaksud pembangunan menurut Rogers dalam Maria E. Pandu (2006:83) adalah perubahan yang mewujudkan nilai-nilai manusiawi, yang memberikan kesempatan terhadap setiap individu untuk mengatur dirinya sendiri, berinteraksi dengan lingkungan, serta menentukan sendiri tujuan politiknya. Meskipun konsep pembangunan tersebut mengemukakan pentingnya nilai-nilai yang memberi kesempatan yang sama terhadap setiap individu untuk mengembangkan

potensinya. Namun masih dijumpai masyarakat diberbagai belahan dunia yang mengalami ketertinggalan sebagai pelaku pembangunan serta keterpurukan dalam kondisi sosial ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah pemanfaatan sumber daya manusia sebagai salah satu penggerak pembangunan yang tidak adil sebab lebih mengutamakan sumber daya kelompok laki-laki dalam proses pembangunan.[]

2

Konsep-Konsep Dalam Relasi Perempuan

Menganalisis tentang kehidupan perempuan sangat bergantung pada konsep yang digunakan. Konsep yang dimaksud adalah marginalisasi, domestikasi, pengiburumahtangaan, ideologi gender, serta konsep mengenai patriarki.

A. Patriarki

Semakin maju suatu masyarakat sistem patriarki akan semakin mendapat reaksi terutama yang dilakukan oleh kaum feminis.

Menurut pengikut feminis radikal bahwa menjelaskan hubungan laki-laki dengan perempuan yang berbeda secara biologis mestinya tidak merugikan kaum perempuan.

Yang dimaksud patriarki menurut Lerner dalam Saptari & Holzner (1997:279) adalah manifestasi dan institusionalisasi dominasi laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak di dalam keluarga serta masyarakat. Perwujudan patriarki dapat dilihat melalui eksploitasi, marginalisasi, domestikasi, pengiburumahtanggaan, dan pada konteks sosial tertentu yang menjadikan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Subordinasi yang terdapat di dalam struktur sosial yang mendominasi perempuan merupakan praktik patriarki. Struktur dominasi laki-laki terhadap perempuan merupakan konstruksi sosial sebab hal tersebut tidak tertanam pada semua laki-laki. Menurut Ambaretnani dalam Sulaeman &

Homzah (2010:37) bahwa patriarki merupakan konsep tentang suatu sistem struktur dominasi laki-laki terhadap semua bidang kehidupan masyarakat yang memosisikan laki-laki sebagai pengontrol kehidupan perempuan. Sistem patriarki dapat dijumpai pada hampir semua masyarakat di dunia, meskipun berbeda satu sama lain dalam hal sifat dan kadarnya. Sistem patriarki merupakan konstruksi sosial budaya yang tidak mudah dirobuhkan atau dihilangkan sebab merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat.

Sistem patriarki yang mendasari pola-pola hubungan gender dalam masyarakat melakukan kontrol terhadap berbagai bidang kehidupan perempuan. Menurut Sulaeman dan Homzah (2010:49) bahwa berbagai bidang kehidupan perempuan yang dimaksud adalah:

a. Tenaga kerja perempuan atau produksi

Pekerjaan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab perempuan, dan tidak dianggap sebagai pekerjaan yang menghasilkan uang sebab tidak dibayar. Meskipun perempuan bekerja diluar rumah untuk memperoleh pendapatan, biasa terjadi mereka bekerja dalam pengawasan laki-laki. Harus mendapat izin dari suami, serta pemasaran hasil pekerjaan dilakukan oleh suami, sehingga laki-laki memperoleh keuntungan dari budaya patriarki. Meskipun perempuan yang menjalankan produksi, mereka tetap menjadi subordinasi laki-laki.

b. Reproduksi perempuan

Dominasi patriarki dalam pengambilan keputusan untuk menentukan anak masih banyak dialami oleh perempuan. Keputusan dalam hal reproduksi

perempuan masih banyak terjadi karena dikontrol oleh laki-laki.

c. Gerakan perempuan

Pembatasan gerakan perempuan bersifat spesifik gender. Sebab perempuan mengalami pembatasan gender dan laki-laki tidak mengalami hal tersebut. Sistem patriarki senantiasa mengontrol gerak perempuan supaya dapat mengendalikan produksi dan reproduksi perempuan. Pembatasan yang dimaksud adalah pembatasan meninggalkan ruangan rumah tangga, pembatasan berinteraksi dengan lawan jenis, pembatasan ruang domestik dan ruang publik.

d. Sumber daya ekonomi dan kepemilikan

Dalam hal sumber daya ekonomi dan kepemilikan, sebagian besar pemanfaatannya dikontrol oleh laki-laki. Dalam hal kepemilikan lebih banyak menggunakan nama suami. Padahal

secara hukum perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memiliki sumber daya ekonomi. Menurut Sulaeman dan Homzah (2010: 49) bahwa beberapa lembaga-lembaga kehidupan yang menunjukkan adanya kontrol masyarakat menurut sistem patriarki terhadap perempuan yaitu:

a) Keluarga

Keluarga adalah unit sosial yang terkecil. Di dalam keluarga terdapat hierarki yang memberikan posisi kepada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Di dalam keluarga awal mula dikenal mengenai hierarki, subordinasi, dan diskriminasi memberikan pelajaran untuk menurut nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan. Patriarki tidak hanya dalam keluarga namun juga dalam masyarakat yang lebih luas, sehingga

tatanan patriarki akan tetap kuat mengikat para warga suatu masyarakat.

b) Media

Media cetak maupun elektronik yang dapat menjangkau sampai masyarakat terpencil telah banyak melakukan eksploitasi perempuan dalam menyampaikan informasi melalui film, sinetron, iklan, serta infotainments, karena melakukan bias-bias gender. Bahkan penyebaran ideologi gender yang patriarki sering ditonjolkan melalui media. Berbagai hal dapat dipertontonkan yang stereotipikal gender yang lebih banyak merugikan perempuan.

c) Sistem politik

Dunia politik seakan-akan menjadi wilayah laki-laki yang kurang melibatkan perempuan dalam

menyusun dan menetapkan kebijakan bagi pengembangan seluruh warga masyarakat Indonesia. Hal tersebut menyebabkan banyak kepentingan perempuan yang tidak terakomodir dalam kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga politik.

d) Sistem ekonomi

Dalam sistem ekonomi yang patriarki, pekerjaan perempuan kurang diperhitungkan. Pekerjaan rumah tangga yang dijalankan oleh perempuan dengan waktu yang panjang tidak di nilai sebagai pekerjaan. Sering terjadi perbedaan upah yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Laki-laki yang menentukan arah kegiatan produksi, mengontrol lembaga-lembaga ekonomi serta lebih

banyak menguasai sumber-sumber ekonomi.

e) Sistem hukum

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, tidak serta merta perempuan memiliki kekuatan secara hukum. Masih bisa dijumpai berbagai hal yang berkaitan dengan hukum yang tidak menguntungkan bagi perempuan. Sering terjadi lebih menguntungkan laki-laki atau kelas sosial yang memiliki kekuatan ekonomi. Sistem patriarki mengandung nilai, norma, serta aturan yang mengutamakan laki-laki.

B. Ideologi Gender

Pengertian ideologi menurut Wearing dalam Irwan A. (1997:86) adalah suatu ide tentang situasi tertentu berdasarkan anggapan dasar tertentu yang memiliki ciri-ciri yaitu:

- a) Ideologi menggambarkan realitas secara parsial dan terfragmentasi dalam suatu kelompok atau kelas yang berkuasa.
- b) Ada hubungan timbal balik antara ideologi dengan sejarah sebab realitas yang dicitrakan ideologi didefenisikan oleh proses sejarah dan proses sejarah dipengaruhi oleh ideologi.
- c) Ideologi mempengaruhi kehidupan individu sebab memberi batasan terhadap aktivitas keseharian manusia. Ideologi memberi cara pandang untuk menghadapi dunia nyata.

- d) Ideologi memberi legitimasi terhadap situasi dan aktifitas tertentu dan mendukung kelompok yang dominan.

Ideologi terbentuk melalui proses sampai pada keadaan individu atau kelompok yang dikuasai menerima dominasi. Apabila ideologi diterima sebagai bagian kehidupan sehari-hari oleh pihak tersubordinasi dengan pihak penguasa menurut Gramsci disebut sebagai ideologi yang hegemonis. Karena ideologi hegemonis menyebabkan manusia tidak kritis. Ideologi tersebut di internalisasi ke dalam keluarga, lembaga pendidikan, negara, dan media massa. Ideologi yang memasuki kehidupan manusia tidak dirasakan sebagai sesuatu yang menekan atau memaksa. Pihak yang tersubordinasi dapat menerima dengan sukarela sehingga mereka bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh kelompok yang dominan.

Ideologi hegemonis menempatkan manusia sebagai makhluk yang pasif serta menempatkan individu seolah tidak dapat menghindari pengaruh ideologi. Konflik sosial tidak akan terjadi pada kelompok yang tersubordinasi apabila menginternalisasikan ideologi. Tidak melihat kemungkinan adanya perubahan sosial yang berasal dari masyarakat (dari bawah).

Apabila menggunakan perspektif pasca strukturalis untuk menjelaskan ideologi, menurut Irwan Abdullah (1997:88) bahwa ideologi yang hegemonis tidak selalu berimplikasi sebagai hegemonis secara total. Meskipun terdapat struktur dan mekanisme yang menekan, individu dan kelompok subordinat akan selalu berupaya untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan harga diri serta otonominya. Sehingga pendekatan tersebut melihat ideologi sebagai sesuatu yang dinamis.

Selanjutnya dijelaskan oleh Scott dalam Irwan Abdullah (1997:88) bahwa kekuasaan dan ideologi dapat dilihat secara dinamis. Proses hubungan kekuasaan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai terdiri atas dua lapisan kenyataan yaitu lapisan formal (*public transcript*) dan lapisan kenyataan yang tersembunyi (*hidden transcript*).

Lapisan formal (*public transcript*) merupakan hubungan interaksi formal yang sesuai ideologi hegemoni yang menggambarkan interaksi terbuka antara kelompok subordinat dengan yang memperlakukannya subordinat. Pada lapisan terdapat perkataan, tindakan, serta tingkahlaku. Interaksi sosial berdasarkan hubungan kekuasaan hanya dipermukaan sebab kelompok subordinat hanya seolah-olah tunduk pada tatanan yang diinginkan oleh kelompok dominan. Kelompok subordinat menyimpan transkrip tersembunyi yang tidak

diperlihatkan pada penguasa dan hanya diperlihatkan pada waktu tertentu ketika kondisi memihak pada kaum tertindas. Hegemoni tidak pernah total dan kelompok subordinat membuat strategi terhadap hubungan kekuasaan yang menekannya. Tidak ada batas yang jelas antara *public transcript* dengan *hidden transcript*. Namun ada hubungan yang sifatnya dialektis diantara dua *transcript* tersebut.

Lapisan kenyataan yang tersembunyi (*hidden transcript*) adalah berupa tindakan, perkataan, gosip, desas-desus, dan cerita yang dikembangkan oleh kelompok subordinasi. Apabila dominasi sangat tinggi maka *transcript* tersembunyi dari yang subordinasi akan semakin berkembang, sehingga terjadi kesenjangan antara transkrip formal dengan transkrip tersembunyi.

Hubungan antara *public transcript* dengan *hidden transcript* dapat dianalisis

dengan menggunakan pendekatan yang humanistik dan dinamis. Hubungan kekuasaan yang terdapat diantara dua hubungan tersebut akan menganalisis tentang persepsi, kegiatan, serta perilaku kelompok yang tersubordinasi.

Menurut Scott dalam Irwan Abdullah (1997:90) bahwa untuk menganalisis hubungan gender serta ideologi gender sangat membantu apabila menggunakan konsep hubungan antara *public transcript* dengan *hidden transcript*.

Ideologi yang telah dikenal pada masyarakat Indonesia umumnya menekankan bahwa peran perempuan yang utama adalah sebagai ibu dan sebagai istri yang beraktivitas hanya disekitar rumah tangga. Ideologi tersebut menyatu dalam budaya masyarakat yang telah disosialisasikan dan senantiasa dilestarikan. Perempuan digambarkan sebagai makhluk yang halus, rapi, kurang memiliki

daya pikir seperti laki-laki sehingga dianggap tidak mampu menduduki jabatan strategis dalam masyarakat atau pemerintahan. Perempuan dianggap sebagai *the second sex* sehingga perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari laki-laki. Dan perempuan harus setia, tunduk, dan mendukung kepentingan laki-laki.

Boleh saja terjadi ideologi gender pada suatu masyarakat yang telah mengalami perubahan secara sosial maupun budaya, juga mengalami modifikasi hingga redefenisi. Walau demikian nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut tetap hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perempuan selalu dihubungkan dengan perannya sebagai ibu dan sebagai isteri. Dan perempuan seutuhnya adalah dirinya sendiri sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya yang dapat berperan sebagai isteri dan sebagai ibu dengan baik. Adapun laki-laki memiliki

peran sebagai penguasa utama dalam rumah tangga karena mempunyai otoritas yang terbesar dalam keluarga. Laki-laki sebagai ayah dan suami adalah pengayom dan pengambil keputusan utama dalam keluarga. Sehingga memiliki otoritas yang besar. Kedudukannya dalam keluarga tersebut memberi legitimasi dalam masyarakat untuk dapat memperoleh kekuasaan dan prestise. Gambaran mengenai ideologi gender tersebut yang berlangsung dalam proses interaksi antara laki-laki dan perempuan dapat disimpulkan bahwa perempuan ter subordinasi dan terjadi ketimpangan yang merugikan pihak perempuan. Meskipun masyarakat secara luas menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang natural atau sifatnya kodrati karena menjiwai semua hubungan yang dikonstruksi dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

C. Marginalisasi

Menurut Alison Scott dalam Saptari & Holzner (1997:8) bahwa ada beberapa macam pengertian tentang marginalisasi, yaitu:

- a) Marginalisasi sebagai proses pengucilan (*exclusion*)

Yang dimaksud disini adalah perempuan yang dikucilkan dari kerja upahan.

- b) Marginalisasi sebagai proses penggeseran perempuan ke pinggiran (*margins*) dari pasar tenaga kerja.

Yang dimaksud disini adalah kecenderungan yang alami oleh perempuan untuk bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak stabil untuk dijadikan pegangan demi kelangsungan hidup, pekerjaan yang upahnya rendah.

- c) Marginalisasi sebagai proses feminisasi atau segregasi.

Meskipun feminisme tidak identik dengan marginalisasi, namun pada kenyataannya sering terjadi pemusatan tenaga kerja perempuan pada jenis pekerjaan tertentu. Pekerjaan tersebut terfeminisasi sebab semata-mata untuk perempuan. Dan terjadi segregasi sebab ada yang diperuntukkan bagi laki-laki yang berbeda untuk perempuan. Perbedaan yang terjadi menyebabkan ketimpangan yang biasanya sangat mencolok, sehingga tenaga kerja perempuan termarginalkan.

d) Marginalisasi sebagai proses ketimpangan ekonomi

Yang dimaksud disini adalah perbedaan upah antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya menurut Scott bahwa konsep marginalisasi tidak dapat digeneralisasikan sebab kondisi tenaga kerja

perempuan akan berbeda pada masing-masing sektor serta masing-masing daerah. Dan konsep marginalisasi yang diungkapkan Scott tidak menjelaskan penyebab perempuan termarginalkan. Konsep marginalisasi hanya sebab deskriptif belum sampai pada analitis. Yang perlu dilakukan adalah menjelaskan tentang marginalisasi secara prosesual dan relatif. Apabila menurut "*prosesual*" berarti marginalisasi dilihat menurut penjelasan waktu. Sebagai contoh adalah tentang perempuan yang bekerja pada sektor tertentu, harus diketahui keadaannya sebelum bekerja dan perubahan yang terjadi setelah proses feminisasi. Adapun menurut "relatif" berarti marginalisasi yang dialami perempuan dibandingkan dengan yang dialami oleh laki-laki supaya diketahui posisinya masing-masing dan sejauhmana marginalisasi dalam struktur pasar tenaga kerja secara keseluruhan.

D. Domestikasi

Istilah domestikasi menurut Saptari & Holzner (1997:10) berarti ruang gerak perempuan yang hanya dibatasi pada wilayah domestik saja.

Menurut Rogers dalam Saptari (1997:10) dalam tulisannya yang berjudul "*The Domestication of Women*" dijelaskan domestikasi sangat erat kaitannya dengan program bantuan negara asing kepada negara-negara dunia ketiga disertai beroperasinya lembaga-lembaga pembangunan dunia, laki-laki baru saja kembali dari dunia perang, dan perempuan mengambil alih semua tugas dalam rumah tangga dengan melepaskan pekerjaan di luar rumah. Perempuan terkucil dari pekerjaan yang memperoleh upah. Mereka dianggap cocok di rumah saja dengan bekal keterampilan domestik serta ajaran moral yang sesuai dengan tempat mereka di

rumah. Domestikasi terutama tercipta di dunia barat yang melihat partisipasi perempuan hanya sebatas “*home economics*” (ekonomi rumah tangga).

E. Pengiburumahtangaan

Istilah pengiburumahtangaan menurut Maria Meis dalam Saptari (1997:11) adalah definisi sosial tentang perempuan sebagai ibu rumah tangga yang secara ekonomi tergantung pada suami yang menafkahi mereka. Proses pengiburumahtangaan yang dijalankan oleh perempuan bertujuan supaya kaum perempuan (isteri) dapat memberi rasa nyaman dan tenang di dalam rumah bagi suami dan anak-anaknya. Disamping juga menjadikan kaum perempuan sebagai konsumen peralatan rumah tangga, serta pakaian terbaru yang dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Tujuan pengiburumahtangaan tersebut

menyebabkan para suami harus giat mencari penghasilan atau keuntungan, disamping melestarikan permintaan barang-barang konsumsi sehingga produksi juga berlangsung terus. Para isteri akan semakin meningkat permintaannya akan kebutuhan rumah tangga, dan menyebabkan suami akan tetap bekerja dengan imbalan penghasilan dan keuntungan dalam memproduksi kebutuhan rumah tangga tersebut.[]

3**Berbagai Perspektif
“Perempuan”**

Maraknya gerakan perempuan dalam dekade terakhir, menyebabkan ilmu sosial tidak lagi hanya menjelaskan mengenai hakikat masyarakat, namun telah sampai kepada persoalan ketidaksetaraan, penyebab ketidakberuntungan yang dialami oleh sebagian besar penduduk dunia. Teori-teori sosiologi dikonstruksi yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang spesifik yang dialami oleh kaum perempuan dalam perjalanan sosial menuju emansipasi.

Perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologi biasanya pula banyak menganalogikan berbeda dalam pandangan sistem sosial budaya. Bahkan pandangan yang memberikan perbedaan tersebut sudah mengakar dalam sistem sosial masyarakat yang menciptakan pemahaman akan perbedaan kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan di dalam keluarga serta dalam masyarakat.

Sebagaimana sistem patriarki yang terbangun dan mengakar sejak lama dalam sistem sosial budaya yang memposisikan perempuan sebagai kelompok yang selalu bergantung pada kelompok laki-laki. Sepanjang sejarah umat manusia secara relatif seluruh kebudayaan yang dihasilkannya selalu memposisikan derajat perempuan di bawah kaum laki-laki.

Meskipun sejarah membuktikan bahwa penindasan terhadap kaum perempuan telah

ada sejak umat manusia ada di bumi, sejak masih ber peradaban rendah sampai pada situasi masyarakat modern, yang paling dirasakan parah atau keadaan perempuan sangat tertindas adalah pada saat pembangunan disemua bidang kehidupan manusia dilaksanakan berbasis industri. Menurut Ivan Illich dalam Ivan A. Hadar (1997:95) bahwa perempuan akan semakin tertindas di zaman pembangunan yang berdasarkan industri baik yang bercorak kapitalis, atau bercorak sosialis maupun kombinasi dari dua corak tersebut. Baik laki-laki maupun perempuan merasakan dampak dari pembangunan yang berbasis industrialisasi sebab banyak terjadi rekayasa sosial dalam kehidupan manusia. Hal tersebut menyebabkan perempuan melakukan gerakan emansipasi sebagai reaksi terhadap berbagai perubahan sosial yang diakibatkan oleh industrialisasi.

Kegiatan industri mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga sebagian anggota keluarga terutama laki-laki bekerja di luar dan memperoleh upah secara permanen. Bagi perempuan lebih memilih tetap di rumah menyelesaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Ini merupakan permulaan terjadinya pemisahan secara tajam antara pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dengan pekerjaan di luar rumah tangga yang dinilai produktif karena pekerjaan tersebut mendapat imbalan berupa gaji atau upah kerja. Pekerjaan domestik yang dianggap tidak produktif serta pekerjaan produktif di luar rumah memang merupakan pekerjaan yang berbeda tetapi tidak dapat dihindari salah satunya sebab dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dua pekerjaan tersebut akan selalu ada. Yang menimbulkan persoalan adalah pembagian kerja didasarkan pada perbedaan biologis jenis kelamin. Yang

mengidentikkan pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perempuan. Adapun pekerjaan yang dijalankan oleh laki-laki adalah pekerjaan yang dianggap produktif yang mendapatkan imbalan atau uang dari pekerjaannya. Oleh karena perempuan yang bekerja di rumah tidak mendapatkan uang dari pekerjaannya menyebabkan perempuan menjadi tergantung kepada laki-laki. Laki-laki yang bekerja di luar rumah (sektor publik) merasakan lebih dinamis dan sangat berpeluang untuk lebih maju karena tidak terperangkap pada kegiatan rutin sebagaimana yang dijalankan oleh perempuan yang bekerja marathon setiap hari di rumah.

Kondisi tersebut secara perlahan menyadarkan kaum perempuan betapa ketertindasan dan keterbelakangan yang mereka alami harus diperjuangkan supaya hidupnya dapat lebih baik. Perempuan

melakukan gerakan melawan tradisi yang tidak adil. Gerakan emansipasi perempuan tersebut yang juga dinamakan feminisme bermunculan menyebar diberbagai negara di dunia yang diawali di negara-negara industri.

Menurut Tong Bhasin dan Khan dalam Maria E. Pandu (2006:28) bahwa sejak abad ke-17 sudah banyak karya tulis yang dibuat oleh penulis dan pemikir mengenai perempuan yang tujuannya untuk memperbaiki kondisi perempuan yang selalu menjadi subordinat laki-laki dan merasakan ketidakadilan. Dari berbagai hasil karya tulisan tersebut yang memberi motivasi kepada para aktivis dan juga ilmuwan untuk memperbaiki kondisi perempuan, sehingga lahir gerakan yang feminis. Paham feminisme tidak seperti paham kapitalisme atau sosialisme. Yang dimaksud feminisme adalah kesadaran pihak perempuan tentang penindasan dan pemerasan yang mereka alami yang terjadi di

masyarakat, dalam keluarga, serta dalam hal lapangan pekerjaan dan ada upaya secara sengaja dari laki-laki dan perempuan untuk merubah keadaan tersebut ke kondisi yang lebih baik tanpa ada keberpihakan baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan.

Awal mula di Eropa, pada abad ke-17 konsep feminisme dikenal sebagai cara pandang terhadap hubungan laki-laki dan perempuan yang terjadi dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Yang menjadi fokus perjuangan feminisme adalah adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, memiliki harta, memberi serta mendapatkan suara dalam pemilihan, mengatur kelahiran anak, serta hak untuk bercerai kalau itu harus dilakukan.

Menurut Munandar dan Homzah (2010:5) bahwa feminisme merupakan gerakan untuk melakukan pembebasan bagi

perempuan yang mentransformasi suatu pranata sosial secara gender dan lebih egaliter. Perempuan melihat kenyataan secara sadar bahwa sistem patriarki yang berlaku pada umumnya di masyarakat sungguh tidak egaliter secara gender karena terutama menindas kaum perempuan.

Selanjutnya menurut Wardah Hafidz dalam Munandar dan Homzah (2010:5) bahwa feminisme merupakan budaya tandingan yang menentang secara tegas nilai-nilai baru dalam masyarakat yang merugikan kaum perempuan disemua aspek kehidupan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Gerakan emansipasi yang disebut feminisme memiliki pemikiran yang berdasarkan pada upaya untuk menambahkan kesadaran akan adanya penindasan, serta ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan dalam keluarga maupun masyarakat, yang selanjutnya ada

tindakan secara sadar yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki secara perorangan maupun berkelompok untuk melakukan perubahan terhadap keadaan yang merugikan perempuan tersebut. Tujuan feminisme adalah menunjukkan penilaian mengenai kondisi perempuan melalui rekonstruksi pengalamannya dan selanjutnya menawarkan kepada perempuan tentang prospek kebebasan di masa depan.

Saat feminisme kali pertama hadir di Eropa yang kemudian meluas ke Amerika telah dilakukan menganalisis persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Sehubungan hal tersebut dikembangkan beberapa aliran feminisme yang masing-masing mendeskripsikan persoalan yang dialami oleh perempuan, menjelaskan penyebab persoalan itu serta menawarkan strategi untuk mengatasi persoalan yang dimaksud.

A. Feminisme Liberal

Gerakan perempuan yang menganut feminisme liberal berpendapat bahwa penindasan yang dialami oleh perempuan disebabkan oleh kebiasaan sikap laki-laki secara individual karena moral yang tidak moral menyebabkan mereka bernafsu untuk berkuasa dalam politik, ekonomi, juga dalam hubungan-hubungan dalam keluarga. Yang menjadi penyebab perempuan tertindas dan terbelakang karena kurang mendapat kesempatan berkiprah di luar rumah dan kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan. Yang menjadi penyebab adalah pandangan masyarakat barat terutama Perancis dan Inggris yang beranggapan bahwa laki-laki yang berpotensi menguasai seluruh kehidupan manusia. Adapun perempuan terbatas pada tugas-tugas rumah tangga.

Pendapat tersebut dijelaskan oleh Mill dan J. J. Rosseau dalam Ollenburger dan Moore.

Selanjutnya dalam Maria E Pandu (2006:31) juga dijelaskan bahwa adapula aktifis dan pemikir feminis yang berpendapat bahwa perempuan juga mempunyai kapasitas akal budi dan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Wollstonecraft dalam Ihromi (1995:87) menjelaskan apabila ia juga tidak sependapat bahwa perempuan tidak dapat berperan leluasa di luar rumah karena kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik seperti laki-laki. Sebab perempuan dapat mengembangkan potensinya apabila diberi kesempatan dan diberi hak-haknya seperti dapat memperoleh pendidikan, dapat ikut dalam berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Memang gerakan feminisme berawal di Eropa sebab kedudukan sosial dan ekonomi perempuan di Eropa pada saat revolusi Perancis sangat buruk sebab industrialisasi

tidak memihak pada perempuan. Kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja tidak memungkinkan akibat industrialisasi. Malahan mengurung perempuan di rumah untuk selalu menjalankan rutinitas pekerjaan rumah tangga.

Menurut Mill dalam Ollenburger dan Moore (1996:22) bahwa subordinasi perempuan disebabkan oleh keterbatasan hukum dan adat sehingga perempuan tidak berkembang. Supaya persamaan laki-laki dan perempuan dapat tercapai, bukan hanya pendidikan yang diberikan secara sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan juga perlu berperan serta dalam kegiatan ekonomi serta diberi hak sipil sama dengan laki-laki. Setiap individu perlu diberikan haknya untuk mengejar keinginannya tanpa saling menjegal dalam upaya mencapai keinginannya itu. Bahwa perempuan memiliki

kemampuan sama dengan pria kalau diupayakan dengan usaha keras tanpa harus mengorbankan perkawinan dan perannya sebagai ibu rumah tangga. Menurut Friedan dalam Ihromi (1995:87) bahwa perempuan yang dianggap normal adalah perempuan yang bermoral. Meskipun perempuan dapat mencapai karier yang tinggi tidak berarti harus menolak mencintai atau dicintai oleh laki-laki apalagi sampai ia menolak untuk mengasuh anaknya sendiri. Perempuan harus bisa mendahulukan perkawinannya serta perannya sebagai ibu rumah tangga daripada ia sebagai perempuan karier. Harus menjadi pertimbangan bahwa keluarga harus di atas kariernya.

Pemikiran feminisme liberal menjelaskan bahwa penindasan yang dialami oleh perempuan disebabkan oleh kurangnya kualitas pendidikan yang dimilikinya serta tidak meratanya kesempatan. Apabila

perempuan menginginkan kedudukan yang tidak tertindas harus menghilangkan semua aspek yang berhubungan dengan dunia domestik. Namun menolak persamaan secara keseluruhan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. tidak perlu melakukan perubahan struktural secara menyeluruh sebab tetap ada perbedaan yang khas terutama yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Cukup melibatkan perempuan dalam peran sosial, ekonomi dan politik karena peran-peran tersebut tidak menghalangi peran reproduksi.

B. Feminisme Marxis

Gerakan perempuan yang menganut aliran feminisme marxis mengungkapkan bahwa penindasan yang dialami oleh perempuan adalah berdasarkan kelas yang berhubungan dengan cara kapitalisme menguasai perempuan yang merendahkan

kedudukannya. Struktur sosial ekonomi dan politik yang sangat berkaitan dengan sistem kapitalisme tersebut yang menjadi penyebab ketertinggalan perempuan. Sebab tenaga kerja perempuan dinilai rendah secara nominal juga secara kualitas. Upaya untuk menyamakan kesempatan antara laki-laki dan perempuan adalah menghilangkan struktur kelas atau perubahan struktural secara menyeluruh, sehingga harus dilakukan perubahan sosial dalam struktur ekonomi dan ketidaksamaan berdasarkan kelas. Kaum perempuan ditempatkan pada kelas tersendiri yang hanya melakukan pekerjaan rumah tangga. Kalaupun mereka bekerja hanya sebagai tenaga kerja cadangan yang murah dan bodoh.

Struktur ekonomi yang menjadi penyebab perempuan tertekan atau tertindas. Menurut Ollenburger dan Moore (1996:25) bahwa apabila penindasan ekonomi terhadap

perempuan dapat diakhiri maka penindasan patriarki dapat dihapuskan dalam masyarakat. Masyarakat harus mau melakukan perubahan sosial yang berhubungan dengan struktur ekonomi dan ketidaksamaan menurut kelas.

Sebelum kapitalisme berkembang, keluarga merupakan kesatuan produksi dalam mempertahankan hidup. Seiring berkembangnya kapitalisme industrial, keluarga bukan lagi termasuk dalam kesatuan produksi. Kegiatan untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia akhirnya beralih yang sebelumnya dilakukan di rumah kemudian ke pabrik. Kemudian terjadi pembagian kerja, laki-laki bekerja di luar rumah mencari nafkah dan perempuan bekerja di rumah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Kapitalisme memberi penghargaan kepada pekerjaan laki-laki karena memproduksi barang sehingga mereka

memperoleh imbalan dari pekerjaannya. Karena perempuan hanya memproduksi barang untuk kebutuhan anggota keluarga sehingga dianggap non produktif karena hanya bernilai guna sederhana. Hal tersebut menjadi hal yang dipermasalahkan bagi aktifis dan pemikir feminis marxis.

Ada pendapat lain dari pengikut feminis marxis sebagaimana dalam Ihromi (1996:90) bahwa meskipun perempuan memperoleh kesempatan untuk bekerja dalam kegiatan ekonomi dan tetap menjalankan tugas dalam rumah tangganya justru menambah beban tugas mereka. Sehingga perlu melakukan tugas secara berkelompok untuk dapat saling membantu antar rumah tangga yang satu dengan rumah tangga yang lain.

Menurut Costa dan James dalam Ihromi (1996:91) bahwa upaya yang dapat dilakukan supaya perempuan tidak tertindas adalah menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai

pekerjaan produktif sehingga memberi upah kepada perempuan atas pekerjaan rumah tangga yang dilakukannya. Pekerjaan perempuan tidak sekedar menyiapkan makanan serta pakaian, tetapi juga memberi ketenangan emosional serta kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Daripada perempuan bekerja di luar rumah, akan lebih baik pekerjaan rumah tangga yang dijalankan diberi upah. Pemberian upah tersebut merupakan kewajiban majikan suami, kakak laki-laki, ayah, atau paman si perempuan. Jadi subordinasi perempuan terjadi karena perempuan memberi pelayanan kepada yang dibutuhkan oleh kapitalisme. Dan solusi untuk menghilangkan penindasan terhadap perempuan adalah melakukan peniadaan kapitalisme.

C. Feminisme Sosialis

Pemikiran feminisme sosialis merupakan sintesis antara feminisme marxis dan feminisme liberal. Bahwa hidup dalam kondisi masyarakat yang kapitalis bukan penyebab tunggal ketertinggalan yang dialami oleh perempuan. Ideologi patriarki dan pembagian kerja secara seksual sangat berhubungan dengan kegiatan produksi dan mengkonstruksi perempuan sebagai subordinat laki-laki. Melakukan analisis pembagian kerja akan dapat menjelaskan kondisi perempuan dalam keluarga, juga ditempat kerja, perempuan memperoleh kedudukan dan peran yang sama dengan laki-laki apabila patriarki dan kapitalisme dapat dihapuskan.

Gerakan feminisme sosialis sejalan pemikirannya dengan gerakan emansipasi masyarakat secara luas yang menginginkan

terwujudnya sistem sosial yang lebih adil secara politik, ekonomi, dan kebudayaan yang melibatkan laki-laki maupun perempuan. Pemikiran gerakan emansipasi bukan tanpa alasan sebab kondisi masyarakat yang senantiasa diwarnai oleh berbagai bentuk dominasi yang dilakukan antar individu juga secara struktural dan kultural.

Menurut Maria E. Pandu (2006:36) dijelaskan bahwa di negara-negara sosialis perempuan juga ikut terlibat dalam pasar kerja dan menunjukkan sebagian besar diantara mereka telah mampu secara mandiri dari segi kehidupan ekonomi. Feminisme marxis tidak dapat menjelaskan yang menjadi alasan kapitalisme melakukan pembagian kerja secara seksual. Perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga dan laki-laki melakukan pekerjaan pada sektor publik. Inilah yang menjadi penyebab munculnya

feminisme sosialis karena feminisme marxis tidak tahu mengenai gender.

D. Teori Perbedaan Gender

Teori tersebut akan menjawab pertanyaan tentang “apa peran perempuan” yang selanjutnya akan memperoleh jawaban bahwa posisi perempuan berbeda dengan laki-laki serta berbeda pengalamannya di berbagai macam situasi, demikian menurut Ritzer (2007:215). Teori perbedaan gender didasarkan pada pemikiran adanya perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal biologis dan kejiwaan yang mengakibatkan adanya perbedaan perilaku, perbedaan kemampuan diberbagai hal, perbedaan dalam kesadaran tentang identitas diri, perbedaan visi dalam membangun pemahaman tentang realitas sosial, perbedaan dalam kreatifitas, serta dalam angan-angan seksual masing-masing. Gambaran kehidupan sosial yang melahirkan

perbedaan gender akan bertahan lama, tidak mudah berubah apapun penyebabnya. Pemikiran tersebut dibantu oleh feminis yang selanjutnya menciptakan tiga teori perbedaan gender yaitu teori feminis kultural, teori peran institusional, dan teori yang didasarkan pada filsafat eksistensial atau fenomenologi.

Menurut feminisme kultural bahwa perempuan yang dianggap inferior dan tunduk pada laki-laki sebenarnya memiliki aspek positif. Sebab “karakter perempuan” atau “personalitas perempuan” dibutuhkan dalam mengatur negara. Masyarakat membutuhkan nilai-nilai yang identik kepada keberadaan perempuan, seperti kerjasama, perhatian, feminisme, serta penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekerasan. Untuk perubahan sosial dalam jangkauan yang lebih luas, sebagaimana menurut Ritzer (2007:418) bahwa cara perempuan dalam menjalani hidup serta memperoleh pengetahuan dapat

sebagai model untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil.

Teori peran institusional mengemukakan bahwa perbedaan gender berasal dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan diberbagai setting institusional. Pembagian tenaga kerja secara seksual berhubungan dengan fungsi perempuan sebagai isteri, ibu, pekerja rumah tangga yang berbeda dengan laki-laki.

Adapun analisis fenomenologis dan eksistensial adalah mengenai marginalisasi perempuan yang berada pada posisi sebagai “*other*” dalam kultur yang diciptakan oleh laki-laki. Laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai “orang lain” (*other*) atau yang di objekkan oleh subjek karena menyadari bahwa “*other*” merupakan ancaman dan membatasi aktualisasi dirinya.

E. Teori Ketimpangan Gender

Dijelaskan dalam Ritzer (2007:420) bahwa teori ketimpangan gender ditandai oleh empat tema yaitu; (1) laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan serta ketimpangan, sebab perempuan memperoleh lebih sedikit peluang untuk mengaktualisasikan diri, kekuasaan, status sosial, sumber daya material dibandingkan dengan laki-laki yang memperoleh posisi sosial menurut kelas, pekerjaan, suku, agama, dan pendidikan; (2) ketimpangan bersumber dari organisasi masyarakat; (3) laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan yang sama untuk memperoleh kebebasan dalam mengaktualisasikan dirinya, namun perempuan kurang mendapat kesempatan dibandingkan laki-laki; (4) situasi dan struktur sosial makin mengarah pada persamaan derajat (egalitarian) secara

alamiah. Ada peluang untuk dapat mengubah situasi dalam kehidupan sosial gender supaya tercipta egalitarian. Teori ketimpangan yang berhubungan dengan feminisme liberal menjelaskan bahwa ketimpangan gender disebabkan oleh pola seksis dan patriarkis dalam divisi kerja. Bahwa kesetaraan gender dapat dicapai apabila pola divisi kerja dirubah dalam hukum, pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan media.

F. Teori Penindasan Gender

Semua teori penindasan gender memberi gambaran dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam mengendalikan, menggunakan, menaklukkan, serta menindas karena kekuasaan. Menurut teori penindasan bahwa perbedaan dan ketimpangan gender merupakan sebagian dari sistem patriarki. Dominasi menurut Ritzer (2007:427) berarti suatu hubungan antar pihak yang dominan

dengan pihak yang disubordinasikan dimana pihak dominan tidak mengalami kebebasan subjektif pihak yang di subordinasi. Sehubungan dengan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan teori penindasan gender berarti keberadaan perempuan hanya untuk digunakan, dikendalikan, ditaklukkan, dan ditindas oleh laki-laki.

Selanjutnya menurut Ritzer (2007:427) bahwa teori utama yang mendukung teori penindasan adalah feminisme psikoanalisis dan feminisme radikal. Yang menjadi spesifik dalam feminisme psikoanalisis adalah pandangannya tentang sistem patriarki, dimana laki-laki dalam tindakannya selalu berupaya untuk menciptakan serta melestarikan sistem yang berpihak kepada laki-laki untuk menaklukkan perempuan, sistem tersebut menyangkut aspek kehidupan perempuan sampai pada organisasi sosial yang dapat bertahan lama. Meskipun

perempuan biasa menentang atas kejadian yang dialaminya tetapi masih biasa terjadi menyetujui penindasan atas dirinya karena posisinya sebagai subordinasi laki-laki.

Adapun pandangan feminisme radikal didasarkan pada dua aspek yaitu; (1) perempuan memiliki nilai positif mutlak yang diyakini untuk menentang yang dinyatakan sebagai devaluasi perempuan secara universal; (2) bahwa perempuan dimana saja berada mengalami penindasan yang keras karena sistem patriarki. Feminisme radikal melihat dalam setiap institusi atau struktur masyarakat terdapat sistem penindasan antar kelas, kasta, etnis, umur, dan warna kulit. Struktur penindasan memberi ruang laki-laki menindas perempuan kemudian menjadi sistem ketimpangan menjadi dominasi yang terjadi dalam masyarakat secara mendasar. Patriarki merupakan struktur yang sangat berpengaruh pada ketimpangan sosial. Laki-

laki berupaya menciptakan dan mempertahankan patriarki karena menjadikan perempuan sebagai pelayan yang selalu menurut pada laki-laki sebagai pemuas keinginan seksual laki-laki, merupakan tenaga kerja yang bermanfaat, sebagai lambang kekuasaan laki-laki, menjadi sumber dukungan emosional, serta dapat meningkatkan status sosial laki-laki.

G. Teori Penindasan Struktural

Pandangan teori penindasan struktural menjelaskan bahwa penindasan terjadi karena ada kelompok tertentu yang mengambil manfaat dari tindakannya mengontrol, memanfaatkan, menundukkan, serta menindas kelompok yang lain. Fokus analisis di arahkan pada struktur patriarki, kapitalisme, rasisme, dan heteroseksisme. Terdapat dua tipe teori penindasan struktural yaitu feminisme sosial dan teori interseksional.

Menurut Ritzer (2007:436) bahwa teori yang berhubungan dengan feminisme sosialis bertujuan untuk; (1) memperoleh kritik yang saling berhubungan terhadap penindasan patriarki dengan kapitalisme menurut sudut pandang pengalaman perempuan; (2) mengembangkan metode untuk analisis sosial; (3) menggabungkan pemahaman mengenai ide dan analisis tentang persoalan-persoalan perempuan.

Menurut feminisme sosialis bahwa perempuan merupakan aspek sentral dalam dua hal yaitu; (1) bahwa penindasan adalah topik utama untuk dianalisis; (2) pengalaman perempuan dijadikan sudut pandang dalam hal dominasi dalam berbagai macam prakteknya. Program yang dilakukan oleh feminis sosialis adalah menyerukan solidaritas global bagi perempuan dalam memerangi kapitalisme yang menindas kehidupan

mereka, kehidupan komunitas, serta merusak lingkungan.

Adapun teori interseksionalitas menjelaskan bahwa perempuan mengalami penindasan dalam berbagai hal penindasan tersebut berlangsung menurut gender, kelas, ras, preferensi seksual dan usia. Teori interseksionalitas pada dasarnya memahami ketimpangan gender yang terjadi karena relasi kekuasaan yang tidak adil.[]

4

Teori Ilmu Sosial Untuk Analisis Perempuan

Banyak teori dalam ilmu sosial yang biasa digunakan menganalisis masalah perempuan. Namun tidak secara tuntas dapat digunakan sebagai konsep untuk menjelaskan berbagai fenomena tentang perempuan. Perlu mempertimbangkan penggunaan teori secara integratif untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan perempuan.

A. Teori Struktural Fungsional

Menurut Glaser dan Straus dalam Ollenburg dan Moore (1996:53) bahwa dibutuhkan konsep sebagai kerangka untuk menganalisis kehidupan perempuan. Dalam hal ini pendekatan struktural digunakan sebagai konsep untuk mengantisipasi struktur sosial.

Teori struktural fungsional yang dikemukakan Talcott Parsons lebih ditekankan pada keluarga yang berperan dalam mempertahankan kelangsungan sistem sosial. Bahwa terjadinya perubahan peran dalam keluarga karena industrialisasi membutuhkan bentuk keluarga yang baru untuk menjalankan fungsi-fungsi yang juga baru. Perubahan sosial yang terjadi bukan karena orang menginginkan hal itu tetapi karena evolusi yang secara lambat laun menjadikan sistem sosial dapat menciptakan keadaan baru.

Menurut Sanderson dalam Nazzir (2009:9) bahwa: (1) Masyarakat adalah sistem yang kompleks yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan, saling tergantung serta saling berpengaruh satu dengan yang lainnya; (2) Setiap unsur berfungsi untuk memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat; (3) Seluruh anggota masyarakat dapat mengintegrasikan dirinya menjadi satu, seperti semua berkomitmen pada nilai yang sama; (4) Masyarakat cenderung menuju pada keadaan ekuilibrium. Apabila ada gangguan pada salah satu unsur maka bagian yang lain cenderung melakukan penyesuaian untuk mencapai keadaan yang harmoni dan stabilitas; (5) Perubahan sosial tidak biasanya terjadi dalam masyarakat. Apabila terjadi perubahan sosial biasanya efek dari perubahan itu menguntungkan bagi seluruh anggota masyarakat.

Teori fungsionalisme struktural menekankan keteraturan masyarakat. Bahwa masyarakat terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Konflik terjadi apabila ada perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya akan mencari cara penyelesaian supaya masyarakat tetap dalam keadaan yang harmoni. Menurut Brown dalam Nazsir (2009:61) bahwa teori struktural fungsional mempelajari struktur suatu masyarakat dan keseluruhan relasi-relasi sosial yang terjadi diberbagai bidang kehidupan manusia.

Dari beberapa pendapat yang diungkapkan oleh Sanderson dan Brown mengenai masyarakat dan sistem sosial, apabila dihubungkan dengan pendekatan teori struktural fungsional akan diperoleh gambaran mengenai ciri-ciri analisis struktural fungsional yaitu, bahwa:

1. Masyarakat memiliki keinginan sebagai suatu kebutuhan yaitu mempertahankan kelangsungan hidupnya;
2. Analisis untuk menjelaskan tentang masyarakat adalah analisis sistem sosial untuk mengetahui keterkaitan antara lembaga, individu dan struktur sosial yang merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu masyarakat.

Anggapan dasar yang terdapat pada pendekatan fungsionalisme struktural menurut Parsons dalam Supardan (2008:154) yaitu sebagai berikut: (1) Masyarakat adalah suatu sistem yang memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain; (2) Sistem sosial selalu bergerak mengarah ke equilibrium secara dinamis; disfungsi, ketegangan dan penyimpangan yang terjadi diatasi melalui penyesuaian; (3) Perubahan

dalam sistem sosial biasanya terjadi secara gradual bukan secara revolusioner.

B. Teori Konflik

Salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis tentang perubahan yang terjadi masyarakat adalah teori konflik. Teori tersebut bertentangan dengan teori struktural fungsional. Menurut Ritzer dalam Nazsir (2009:16) bahwa teori struktural fungsional beranggapan bahwa semua struktur adalah fungsional untuk suatu masyarakat secara keseluruhan. Teori struktural fungsional menekankan keteraturan dalam masyarakat dan mengabaikan kemungkinan terjadinya konflik atau perubahan. Pada kondisi tertentu masyarakat dapat saja mengalami perubahan yang diakibatkan oleh terjadinya konflik.

Menurut Marx dan Weber dalam Nazsir (2009:17) bahwa konflik yang terjadi pada individu atau kelompok merupakan bagian

atau unsur dalam pengorganisasian kehidupan sosial. Bahwa konflik terjadi karena individu dan kelompok berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui sumber daya yang terbatas. Selanjutnya menurut Marx dan Nazsir (2009:19) bahwa munculnya konflik sosial karena ada upaya untuk memiliki akses kondisi material yang menopang kehidupan sosial. Adapun menurut Weber dalam Nazsir (2009:19) bahwa konflik terjadi karena individu atau kelompok berupaya memperebutkan sumber daya ekonomi yang merupakan ciri kehidupan sosial. Pertentangan diantara individu dan kelompok merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang tidak dapat dihilangkan.

Konflik yang terjadi dalam masyarakat disebabkan sumber-sumber yang langka sehingga menjadi penyebab terjadinya perubahan. Fokus kajian teori konflik adalah

mengenal serta menganalisis berbagai konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial sebagai sistem. Menurut Supardan (2008:126) bahwa pada teori konflik terdapat asumsi yaitu sebagai berikut; 1). Setiap masyarakat akan mengalami suatu proses perubahan sebagai gejala yang tidak dapat dihindari; 2). Pada setiap masyarakat terdapat konflik di dalamnya.

Selanjutnya menurut Marx dalam Supardan (2008:126) bahwa didalam masyarakat terdapat struktur kelas sehingga warga masyarakat yang berbeda kelas memiliki kepentingan ekonomi yang tidak sama, saling bertentangan satu sama lain menurut kelasnya. Pada setiap masyarakat apapun konflik akan selalu ada karena menjadi bagian dari dinamika kehidupan.

Konflik tidak selalu identik dengan pertentangan. Sebab terkadang konflik dibutuhkan sebagai pemicu terjadinya

perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan teori konflik bahwa di setiap masyarakat akan ada yang mendominasi dan yang didominasi. Satu sama lain dalam kelompok yang berbeda ada yang menguasai dan adapula yang dikuasai. Karena masyarakat merupakan sistem yang dinamis sangat jarang terjadi suatu kejadian konflik dapat bertahan. Sebab dalam suatu masyarakat yang didalamnya ada konflik kecendrungan akan ada yang berkuasa dan yang dikuasai.

Menurut Coser dalam Nazsir (2009:23) bahwa konflik tidak selalu disfungsi bagi suatu kelompok. Konflik dapat membantu dalam mempertahankan suatu struktur sosial. Konflik dapat berfungsi sebagai filter atau mekanisme supaya kelompok dapat dipertahankan. Karena adanya konflik menyebabkan para anggota kelompok bersatu untuk mengukuhkan kembali identitas

kelompok yang sudah mengalami konflik. Dengan demikian konflik dapat memberi efek positif ataupun sebaliknya. Sehingga perlu mempertimbangkan cara mengelola konflik supaya dapat memberi efek positif atau pun sebaliknya. Sehingga perlu mempertimbangkan cara mengelola konflik supaya dapat memberi efek yang positif.

C. Teori Sistem Sosial

Menurut Parsons dalam Nazsir (2009:64) bahwa sistem sosial dapat dianalisis dengan menggunakan persyaratan fungsional menurut kerangka AGIL yaitu *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan), *Integration* (Integrasi), *Latent Pattern Maintenance* (Pelestarian Pola Laten).

Kerangka AGIL disebut juga paradigma empat fungsi. Apabila sistem berupaya untuk tetap bertahan atau berada dalam kondisi yang stabil maka akan diperhadapkan pada

upaya pemecahan empat masalah fungsional. Konsep paradigma empat fungsi merupakan elemen-elemen yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diklasifikasikan menurut fungsinya bagi kelompok yaitu; 1). Adaptasi terhadap lingkungan tertentu; 2). Pemenuhan tujuan atau pencapaian tujuan termasuk kebijakan kelompok selanjutnya; 3). Integrasi kelompok sebagai satu kesatuan sistem sosial; 4). Pelestarian pola yaitu peduli terhadap pola-pola nilai dalam kelompok.

Suatu sistem sosial memiliki berbagai relasi yang juga adalah bagian dari struktur. Menganalisis berbagai regularitas dalam struktur akan memberi pemahaman tentang keterkaitan antara bagian-bagian struktur atau relasi-relasi dalam struktur dengan sistem sebagai satu kesatuan regularitas hubungan yang terjadi diantara individu satu sama lain atau individu dengan kelompok akan membentuk pola-pola orientasi nilai

yang merupakan bagian dari sistem kultural. Apabila pola-pola nilai dijadikan sebagai bagian dari kehidupan masing-masing individu atau menjadi rujukan atau tuntunan dalam berinteraksi satu sama lain maka pola-pola nilai yang dimaksud menjadi bagian dari sistem personalitas yang dilakukan dengan cara internalisasi pada masing-masing individu.

Ada pilihan pola-pola nilai yang dianggap positif oleh individu dan diinternalisasikan pada diri masing-masing. Apabila pola-pola nilai disosialisasikan pada seluruh anggota masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sosial secara menyeluruh maka pola-pola nilai yang dimaksud merupakan bagian dari sistem sosial yang telah melalui proses-proses institusionalisasi. Menyatunya pola-pola nilai berupa pola-pola nilai yang menjadi bagian sistem kultural berupa cara-cara berinteraksi antar manusia

dengan pola-pola nilai sistem personalitas yang ada pada masing-masing individu sebagai cirinya masing-masing serta pola-pola nilai-nilai yang melembaga untuk dijadikan pilihan atas nama seluruh anggota masyarakat yaitu sistem sosial akan membentuk struktur dan juga merupakan dinamika sistem sosial.

Menurut Parsons dalam Supardan (2008:153) bahwa teori sistem sosial melihat kenyataan sosial secara luas, tidak terbatas pada analisis tingkat struktur sosial saja. Bahwa sistem sosial merupakan salah satu sistem dalam perspektif secara keseluruhan yang dapat menganalisis mengenai tindakan yang bersifat umum. Sistem-sistem yang menyatu adalah sistem sosial, sistem budaya dan sistem personalitas sebagai suatu keseluruhan yang membentuk tindakan yang bersifat umum. Tindakan sosial individu yang membentuk sistem sosial.

Kerangka paradigma empat fungsi yang dikembangkan dalam teori sistem sosial menurut Parsons dalam Supardan (2008:154) merupakan empat persyaratan fungsional yang terdapat pada semua sistem sosial yaitu sebagai berikut; (1) *Adaptation* yakni keharusan sistem sosial dalam menghadapi lingkungan yang bersifat transformasi aktif atau yang juga sukar diubah; (2) *Goal Attainment* menunjukkan bahwa tindakan selalu diarahkan terutama pada tujuan bersama dalam suatu sistem sosial; (3) *integration* menunjukkan interelasi antar individu atau individu dengan kelompok dalam suatu sistem sosial; (4) *Latent Pattern Maintenance* menunjukkan berhentinya interaksi karena letih atau jenuh kemudian tunduk pada sistem sosial tempatnya berada.

Sistem AGIL yang digambarkan oleh Parsons menjelaskan bahwa setiap sistem sosial harus mampu melakukan adaptasi

dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem sosial juga harus memiliki tujuan. Dengan demikian tindakan bersama dilakukan oleh para anggota harus diarahkan pada pencapaian tujuan sesuai yang diinginkan oleh sistem sosial. Setiap sistem sosial harus mampu melakukan integrasi membentuk satu kesatuan. Para anggota dalam sistem sosial harus mampu melakukan solidaritas supaya sistem sosial dapat dipertahankan. Hal tersebut dilakukan sebagai strategi mempertahankan pola.

Menurut parson dalam Nazsir (2009:78) bahwa yang dimaksud sistem sosial adalah sistem interaksi tindakan tersebut tersusun atas sejumlah sub sistem yang memiliki fungsi terhadap sistem yang saling berkaitan dan saling mendukung. Selanjutnya menurut Soekanto dalam Nazsir (2009:69) bahwa secara struktural sistem sosial memiliki unsur-unsur pokok yakni sebagai berikut; (a)

kepercayaan (gejala yang dianggap benar); (b) perasaan (menurut emosi atau prasangka); (c) tujuan (cita-cita yang dicapai dengan melakukan perubahan atau mempertahankan sesuatu); (d) kaedah (tingkah laku yang pantas); (e) kedudukan (pelaksanaan peran sesuai hak dan kewajiban dalam proses interaksi sosial); (f) tingkatan atau jenjang (posisi sosial); (g) sanksi (persetujuan atau penolakan atas perilaku tertentu); (h) kekuasaan (kemampuan mempengaruhi pihak lain); (i) fasilitas (sarana untuk mencapai tujuan).

Penjelasan yang dikemukakan oleh Soekanto tersebut mengenai unsur-unsur yang dimiliki oleh sistem sosial menunjukkan bahwa sistem sosial bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh manusia, kemudian dipertahankan, atau diganti. Sehingga sistem sosial dapat mempengaruhi perilaku manusia.

Yang dimaksud sistem sosial menurut Nazsir (2009:71) yang berdasarkan pemahaman fungsi sosial harus memenuhi kriteria sebagai berikut; 1) harus ada sejumlah orang yang memiliki kegiatan; 2) kegiatan masing-masing individu saling berhubungan secara timbal balik yang sifatnya konstan. Masing-masing individu dalam sistem sosial disebut bagian atau elemen yang mempunyai fungsi.

Adapun menurut Lawang dalam Winardi (2009:71) bahwa setiap sistem terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai fungsi dalam mempertahankan sistem. Hubungan antara bagian-bagian berlangsung secara timbal balik saling mendukung satu sama lain, penentuan fungsi masing-masing bagian dalam sistem dapat diketahui batas-batas suatu sistem sosial.

D. Teori Maslow

Terdapat sejumlah kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan. Kekuatan tersebut berupa keinginan-keinginan (*wants*), kebutuhan-kebutuhan (*needs*) dan perasaan takut (*fears*). Menurut Maslow dalam Winardi (2007:11) bahwa terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku manusia yaitu sebagai berikut; (1) manusia adalah makhluk yang serba berkeinginan. Manusia selalu menginginkan sesuatu dan jumlahnya yang banyak. Hal tersebut berlangsung sejak lahir sampai meninggal dunia; (2) hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menyebabkan timbulnya kekuatan yang mempengaruhi perilaku kita; (3) kebutuhan manusia diurut tingkatannya berdasarkan pentingnya kebutuhan tersebut.

Konsep pemikiran Maslow mengenai urutan kebutuhan manusia sebagaimana dalam Winardi (2007:13) yang terdiri atas;

1. Kebutuhan fisiologikal

Kebutuhan tersebut berfungsi untuk mempertahankan hidup seperti oksigen, istirahat, pangan dan aktifitas.

2. Kebutuhan akan keamanan

Kebutuhan tersebut akan mendominasi perilaku manusia apabila kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi. Kebutuhan akan keamanan adalah keinginan akan dunia yang teratur serta dapat diprediksi, contohnya seperti kepastian ekonomi.

3. Kebutuhan-kebutuhan sosial

Kebutuhan tersebut memotivasi perilaku manusia untuk bekerjasama dengan pihak lain. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut muncul setelah

kebutuhan fisiologikal dan kebutuhan akan keamanan sudah terpenuhi.

4. Kebutuhan akan penghargaan

Kebutuhan tersebut terdiri atas kebutuhan untuk penghargaan diri dan untuk penghargaan dari pihak lain. Kebutuhan akan penghargaan diri seperti kepercayaan diri, prestasi, kompetensi, pengetahuan, penghargaan diri, kebebasan dan tidak bergantung. Adapun kebutuhan akan penghargaan dari pihak lain yaitu kebutuhan akan status, pengakuan, atau respek dari pihak lain.

5. Kebutuhan untuk merealisasi diri

Kebutuhan individu akan merealisasi potensi yang ada pada dirinya supaya menjadi kreatif.

Menurut Maslow dan Winardi (2007:74) bahwa manusia termotivasi memenuhi kebutuhannya mulai dari kebutuhan yang

paling dasar sampai kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. individu akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhannya yang paling kuat pada saat tertentu.[]

5**Perubahan Sosial & Agen Perubahan****A. Perubahan Sosial dan Agen Perubahan dalam Kerja Perempuan**

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian perubahan sosial. Menurut Ritzer dalam Supardan (2007:142) bahwa perubahan sosial terjadi karena ada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, serta masyarakat pada waktu tertentu. Dapat juga dijelaskan sebagai modifikasi dalam pengorganisasian masyarakat. Sehingga penjelasan mengenai perubahan sosial

menurut pengertian tersebut adalah semua modifikasi yang dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat, serta lembaga-lembaga sosial yang memberi efek terhadap sistem sosial termasuk sikap, nilai, serta pola perilaku diantara individu dan kelompok dalam suatu masyarakat.

Selanjutnya menurut Alvin Tofler dalam Supardan (2007:142) bahwa perubahan akan terus terjadi sebab perubahan adalah fakta kehidupan. Perubahan tidak hanya penting bagi kehidupan sebab perubahan itu sendiri adalah kehidupan. Perubahan yang terjadi pada masyarakat sangatlah beragam. Untuk satu jenis perubahan ada yang berlangsung sangat cepat pada satu masyarakat dan berlangsung lama pada masyarakat yang lain. Masyarakat akan terus berproses mengalami perubahan tanpa diketahui. Dan perubahan itulah yang akan abadi di dunia. tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri.

Dijelaskan pula Herbert Spencer, Laeyendecker, Sorokin, Vico dalam Supardan (2007:143) mengenai perubahan sosial, bahwa wujud perubahan sosial terjadi dari berbagai bentuk perubahan. Spencer menyebutnya sebagai "*The Survival of The Fittest*" yang menerangkan hubungan manusia dengan lingkungannya. Bahwa manusia paling kuat, paling pandai, serta paling berkuasa dalam menjalin hubungan dengan lingkungannya. Laeyendecker menjelaskan mengenai evolusi sosial suatu budaya sebagai suatu perubahan yang tidak ada kekuatan mampu menolaknya terjadi karena ada kekuatan yang menjadi pendorong yaitu evolusi universal. Sorokin menjelaskan perubahan sosial sebagai suatu kejadian seperti siklus,. Ini tertuang dalam karyanya "*Social and Cultural Dynamics*". Bahwa perubahan yang terjadi merupakan dinamika budaya dan sosial suatu masyarakat dimana perubahan itu bisa berulang

kejadiannya. Adapun menurut Vico dalam karyanya "*The New Science*" menganalogikan perubahan sosial dan sejarah menyerupai spiral yang bergerak secara melingkar progresif dan semakin maju.

Menurut Sztompka (2004:65) bahwa masyarakat selalu berproses dan selalu mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada semua tingkat kompleksitas internalnya. Masyarakat terdiri dari seperangkat proses yang saling terkait satu sama lain. Ditingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultural. Di tingkat mezzo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi. Adapun di tingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual.

Masyarakat akan selalu berubah dan perubahan ada setiap masyarakat. Setiap saat selalu ada masyarakat. Dimasa lalu, sekarang, dan dimasa yang akan datang. Masyarakat dimasa lalu ada kaitannya dengan masyarakat

sekarang, dan masyarakat ada saat ini berproses dan berkaitan dengan keberadaan masyarakat yang akan datang. Tidak terputus keterkaitan itu dan akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak dapat dipastikan.

Menurut Sztompka (2004:211) bahwa terjadinya perubahan sebagai kejadian yang memiliki kualitas dan keteraturan proses sejarah menurut logikanya sendiri atau kekuatan dari alam. Hal ini disebut aliran *developmentalism* yang di dalamnya termasuk evolusionisme dan Marxisme. Pemikiran dalam aliran *developmentalism* menganggap sejarah berkembang berdasarkan kekuatannya sendiri serta bergerak menuju tujuan tertentu. Namun aliran pemikiran tersebut mendapat kritik karena diragukan. Pemikiran *Developmentalism* memudar secara perlahan dan digantikan oleh pendekatan perubahan sosial serta proses historis sebagai alternatif. Kritik terhadap *Developmentalism* memberi

penjelasan mengenai dinamika sosial dan historis.

Pandangan Robert Nisbet dalam Sztompka (2004:214) mengenai evolusionisme sosial yang merupakan dinamika sosial yaitu; (1) evolusionisme sosial bertujuan untuk analisis deskriptif yang memahami jalan, arah, dan tahapan proses historis; (2) yang menjadi pokok masalah adalah objek tunggal, masyarakat, komunitas, kelompok, kelas sosial, dan pranata (keluarga, hukum, dan agama); (3) mencoba menemukan hukum yang menentukan tentang arah dan proses perubahan; (4) perbedaan struktural dan fungsional diperlakukan sebagai inti mekanisme evolusi.

Evolusionisme dan materialisme-historis merupakan aliran developmentalism yang beranggapan kualitas dan keteraturan proses sejarah ditentukan oleh loginya sendiri atau kekuatan dari dalam. Sztompka, 2004:211)

mendapat kritik dari Nisbet sebab sejarah adalah konkrit. Bukan abstrak yang teorinya dipaksakan terhadap sejarah. Apabila ingin mengetahui perilaku sosial yang aktual di suatu tempat, bukan pertumbuhannya yang dilihat tetapi sejarahnya. Pendapat Nisbet tersebut menekankan perubahan dalam sejarah yang konkrit, yang mungkin, serta penyebab dari luar. Pendapat tersebut sejalan dengan teori perubahan sosial mengenai teori modern tentang agen perubahan.

Menurut Homans dalam Sztompka (2004:224) bahwa agen perubahan berada dalam tindakan agen sosial yang pada saat yang bersamaan agen perubahan yang dimaksud di manusiakan dan disosialkan.

Menurut Sztompka (2004;224) bahwa agen perubahan berasal dari masyarakat yang memiliki kekuatan istimewa bukan karena bawaan sejak lahir. Ia pemimpin yang tahu cara mengikuti rakyat yang dipimpin.

Tindakannya atas nama dan untuk rakyat. Mampu membentuk suasana sosial untuk orang lain, membangun hubungan sosial, mengatur kondisi interaksi atau pertukaran yang terjadi dalam masyarakat. Agar perubahan bertindak secara personal dan juga memiliki peran sosial. Peran sosialnya akan diwujudkan dalam melaksanakan perubahan.

Peran individu sangatlah kecil di dalam perubahan sosial. Akumulasi semua individu dalam suatu masyarakat yang melakukan aktivitas untuk suatu perubahan sosial. Kekuatan perorangan sangat kecil dibandingkan yang dilakukan secara kolektif. Sehingga agar perubahan dapat berwujud aktor individual atau sebagai agen kolektif.

Pertumbuhan, perkembangan, dan pembangunan merupakan proses perubahan sosial. Setiap masyarakat memiliki dinamikanya sendiri. Masing-masing akan mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan

pembangunan yang berbeda satu sama lain menurut situasi dan kondisi serta waktu yang dilaluinya. Menurut Holzner (1997:243) bahwa pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi yang meliputi materi, barang-barang dan jasa, tetapi juga mencakup aspek non-ekonomi yang meliputi pemerataan akses terhadap berbagai sumber daya, pekerjaan, pendidikan, serta partisipasi dalam politik.

Perkembangan masyarakat dan perubahan sosial menurut Holzner (1997:244) sangat berkaitan dengan perubahan sistem ekonomi, terutama sistem produksi. Menjelaskan tentang perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat harus mencakup faktor internal maupun eksternal yang berhubungan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Abercombie dalam Holzner (1997:244) bahwa menjadi faktor penting dalam analisis perubahan sosial adalah; a)

tingkat analisis yang berbeda tetapi saling terkait, sebagai contoh adalah pemberian bantuan kepada negara yang bersedia mengurangi subsidi (misalnya pertanian). Hal tersebut akan menyebabkan naiknya harga pangan dan mengurangi kondisi kesejahteraan. Dan pada akhirnya perempuan yang sangat merasakan beratnya mengatur anggaran rumah tangga; b) faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud disini adalah adanya peran tertentu pada suatu lembaga sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Dan ada intervensi dari luar yang juga ikut serta menjadi penyebab perubahan sosial tersebut; c) yang menjadi penyebab utama terjadinya perubahan sosial, sebab sering terjadi lebih dari satu yang menjadi penyebab perubahan; d) pelaku perubahan yang berkaitan dengan sistem sosial yang mendorong terjadinya perubahan sosial; e) menganalisis perubahan

yang berangsur-angsur biasanya lebih sulit sebab tidak mudah menentukan batas waktu, momen perubahan serta akibat dari perubahan.

Komponen perubahan sosial di atas digunakan untuk menjelaskan tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan yang biasanya terjadi dalam keluarga, pabrik, atau mungkin di tempat lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial atau perubahan ideologi gender.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada perempuan yang dapat menjadi pelaku perubahan yang biasanya dijumpai pada kelompok cendekiawan, birokrat, atau buruh. Mereka mampu menentukan kebijakan sebagai keinginan kehidupan perempuan yang lebih baik, meskipun bukan untuk perempuan seluruhnya. Biasa ada yang berjuang karena ingin melanggengkan posisinya, bukan karena demi kehidupan perempuan.

Pekerjaan perempuan menurut Holzner (1997:250) selalu berada dalam konteks sosial yang senantiasa mengalami perubahan sosial, yang selanjutnya berhubungan dengan bentuk kerja perempuan yang lebih berkembang dan lebih terditerensiasi serta berkaitan dengan hubungan antara gender atau dalam gender yang sama untuk kelas sosial yang berbeda.

B. Konsep Modern Tentang Agen Perubahan

- Konsep Morphogenesis

Konsep morphogenesis adalah karya Walter Buckley (1967) yang tulis dalam "*Sociology and Modern System Theory*". Konsep tersebut pada mulanya berpijak pada fungsionalisme struktural dan teori sistem umum yang selanjutnya di revisi sebagai gabungan wawasan teori pertukaran, interaksionisme simbolik, model perilaku kolektif. Menurut sistem morphogenetik

bahwa struktur akan terus di bangun dan di ubah tanpa henti. Unsur-unsur sistem secara terus-menerus berinteraksi dengan sumber ketegangan internal dan eksternalnya sampai pada kondisi lingkungan yang berubah di dalam strukturnya menurut cara tertentu. Inilah yang dimaksud “*morphogenesis*”, yaitu suatu proses yang cenderung mengembang dan mengubah struktur atau keadaan suatu sistem. Sistem *morphogenesis* muncul, bergerak dan berkembang sampai mengalami restrukturisasi sendiri (Buckley dalam Sztompka, 2004:227).

- Teori Membimbing Diri Sendiri

“Teori membimbing diri sendiri” merupakan analisis yang dibuat oleh Amitai Etzioni (1968) tentang mobilisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang menjadi inti dari teori tersebut mobilisasi kolektif serta masyarakat sumber utama perubahan yang

terjadi di antara mereka dan hubungan mereka dengan unit-unit sosial yang lain. Unit sosial yang di mobilisasi akan mengubah struktur dan batasnya sendiri dari unit lainnya serta dengan struktur yang merupakan induknya sebagai tempatnya menjadi anggota. Bahwa masyarakat akan terus melakukan gerakan sosial sebab kemampuannya mengubah diri dalam kolektifitas, kelompok, serta organisasi sosial. Agen perubahan ada pada berbagai jenis kolektifitas. Perubahan terjadi karena mobilisasi bukan secara otomatis (Etzioni dalam Sztompka, 2004:228).

- Morphogenesis Aturan Baru

Selanjutnya pada tahun 1988 Margareth Archer mengajukan konsepnya tentang teori morphogenesis dalam bukunya "*culture and agency*". Dijelaskan bahwa sistem sosial mampu melakukan restrukturisasi secara

radikal yang disebabkan oleh agen manusia. Pola restrukturisasi terbentuk tidak lepas dari adanya interaksi. Pertukaran posisi yang kompleks antara struktur dan tindakan menyebabkan perubahan bentuk sistem. Digunakan analisis dualitas untuk mengkaji pertukaran posisi yang dimaksud. Bukan konsep dualitas. Analisis dualitas berarti tindakan dan struktur merupakan dua variabel yang terpisah dalam sistem sosio kultural yang kompleks. Adapun konsep dualitas berarti menghilangkan otonomi atau kebebasan pada struktur atau pada tindakan, atau keduanya (struktur dan tindakan).

Adapun argumen yang mendukung sistem dualitas yaitu; (1) Argumen metodologis. Bahwa tindakan dan struktur saling terpisah tanpa saling ketergantungan, tanpa saling berpengaruh; (2) Argumen ontologis. Bahwa tindakan dan struktur berbeda karena kondisi struktural. Interaksi

sosial dan perluasan struktural terjadi pada waktu yang berbeda. Interaksi yang terjadi berikutnya berbeda dari tindakan sebelumnya karena kondisi akibat struktural tindakan sebelumnya. Struktur mendahului tindakan yang mengubahnya, dan perluasan struktural melemahkan tindakan.

Pemikiran Archer yang baru adalah “*morphogenesis agen*”. Yang menjelaskan agen atau pelaku menyebabkan perkembangan struktural dan kultural, disaat yang bersamaan dirinya juga dikembangkan dalam proses tersebut. Ciri yang dimiliki oleh agen adalah keteladanan, kemanfaatan, prakarsa, dan penemuan.

Adapun yang dimaksud *morphogenesis ganda* adalah proses pengembangan struktur dan agen merupakan produk interaksi. Struktur adalah medium yang dipersiapkan, yang berkembang sebagai hasil interaksi. Agen membentuk struktur yang kemudian terus

membentuk ulang struktur dan disaat yang sama sambil membentuk dirinya dalam proses tersebut. Jadi terdapat hubungan dialektika antara tindakan dan struktur.

Teori tentang agen perubahan yang dijelaskan oleh beberapa pakar dapat dikemukakan sebagai berikut; (1) Masyarakat adalah suatu proses yang mengalami perubahan terus menerus; (2) Pada umumnya perubahan berasal dari dalam yang melakukan transformasi pada dirinya sendiri; (3) Yang menggerakkan perubahan adalah kekuatan agen individual dan kolektif; (4) Arah, tujuan, dan kecepatan perubahan dapat menjadi ajang konflik dan perjuangan; (5) Tindakan terjadi dalam struktur. Tindakan menyebabkan kualitas dualitas struktur (yang membentuk dan yang dibentuk) dualitas kualitas aktor (yang menghasilkan dan dihasilkan); (6) Pertukaran antara tindakan dan struktur terjadi secara perlahan.[]

6**Perempuan & Tindakan Rasional**

Merupakan naluri manusia yang memiliki hasrat untuk hidup dengan sesama manusia yang ditunjukkan melalui keinginannya bergaul, ingin diterima oleh orang lain, atau ingin diterima sebagai anggota suatu kelompok. Berbagai keinginan tersebut dimungkinkan terwujud karena ada interaksi yang berlangsung yang sesuai dengan keinginan orang-orang yang terlibat dalam interaksi.

Sejak awal mula dilahirkan kemudian tumbuh melewati proses sosialisasi, individu senantiasa mengembangkan kemampuannya berinteraksi dengan individu-individu yang lain. Yang merupakan dasar terbentuknya suatu masyarakat adalah pergaulan hidup manusia yang melakukan interaksi sosial. Kehidupan bermasyarakat dimungkinkan adanya karena berlangsungnya interaksi sosial, yang selanjutnya di dalam interaksi terjadi proses adaptasi untuk bisa saling menyesuaikan satu sama lain. Hal tersebut sangat penting dalam suatu kelompok masyarakat supaya kestabilan masyarakat tersebut tetap dapat terjaga.

Terdapat berbagai peristiwa yang berkaitan dengan proses adaptasi yang berlangsung dalam interaksi sosial yaitu komunikasi, kompetisi, konflik, akomodasi, asimilasi, dan kerja sama. Demikian juga halnya yang terjadi pada kehidupan

perempuan pedagang asongan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Kelompok pedagang asongan terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi, saling mengadaptasikan diri satu sama lain untuk menjaga harmonisasi dalam kelompoknya. Mereka juga akan berinteraksi dengan siapapun yang dijumpai di lokasi tempatnya bekerja mencari nafkah.

Ketika beraktifitas ada peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi seperti komunikasi, asimilasi, akomodasi, kompetisi, dan kerjasama. Bahkan terjadinya konflik bisa terwujud apabila proses adaptasi tidak mampu mengarahkan interaksi kepada harmonisasi. Menurut Popenoe dalam Dadang (2008:140) bahwa interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu masyarakat memiliki dinamika yang tinggi.

Semakin kompleks suatu masyarakat akan semakin dinamis kehidupan sosial

dalam masyarakat tersebut. Dinamika kehidupan sosial selalu berkaitan dengan interaksi sosial. Semakin dinamis suatu masyarakat akan semakin kompleks aktifitas sosial yang berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut, dan aktifitas sosial dapat terwujud karena terdapat interaksi sosial.

Menurut Suyanto dan Ariadi (2007: 16) yang menjelaskan bahwa pengertian mengenai interaksi sosial berbeda dengan yang dimaksud tindakan sosial. Interaksi sosial terjadi sebagai proses antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Adapun tindakan sosial merupakan hal-hal yang dilakukan individu atau kelompok di dalam berinteraksi satu sama lain. Menurut Mead dalam Suyanto dan Ariadi (2007:20) bahwa interaksi sosial dapat berjalan secara

tertib, demikian juga masyarakat dapat berfungsi secara normal apabila individu-individu di dalam masyarakat tersebut memiliki kemampuan bertindak yang sesuai dengan konteks sosialnya serta mampu menilai secara objektif perilakunya dari sudut pandang orang lain.

Selanjutnya menurut Weber dalam Suyanto dan Ariadi (2007:21) bahwa terbentuknya kenyataan sosial karena ada tindakan-tindakan sosial. Aktifitas sosial dapat berlangsung karena dimungkinkan oleh adanya interaksi sosial. Demikian juga kenyataan sosial dapat terbentuk karena disebabkan oleh adanya interaksi sosial. Ketika terjadi interaksi antar individu satu sama lain, masing-masing akan berusaha saling memahami makna tindakan sosial yang dilakukannya.

Berdagang asongan adalah aktifitas yang berlangsung di pelabuhan yang

melibatkan pedagang asongan itu sendiri dan terdapat individu-individu yang lain yang dapat saling memahami aktifitas tersebut baik yang membeli barang dagangan pedagang asongan maupun yang tidak membeli. Pada saat terjadi penertiban yang dilakukan oleh petugas pelabuhan yang melarang pedagang asongan berdagang di dermaga pelabuhan dan juga di atas kapal, hal ini pedagang asongan hanya bisa menjadi pedagang kaki lima. Kondisi tersebut dapat dipahami oleh yang berdagang kaki lima dan tidak ada pertikaian diantara mereka sebab hal ini biasanya berlangsung sementara dan secara tiba-tiba. Mereka menyadari akan kebersamaan yang lebih penting. Diantara mereka ada perasaan senasib berjuang untuk dapat bertahan hidup.

Berdagang asongan merupakan aktifitas ekonomi yang berlangsung dalam situasi sosial yang kompleks. Di dalam situasi tersebut berlangsung berbagai peristiwa,

bukan hanya berdagang untuk memperoleh penghasilan. Bagi yang tidak melakukan transaksi jual beli pun dapat menikmati kejadian-kejadian disekitarnya. Pada awalnya tidak ada keinginan untuk berbelanja. Karena terpengaruh oleh barang yang ditawarkan terutama harga yang menurutnya memang sepantasnya, calon pembeli akhirnya mau berbelanja. Apalagi kalau sudah merasa berat untuk menolak tidak membeli karena melihat kondisi pedagang asongan yang sangat berharap dagangannya laku terjual yang kemudian hasilnya untuk menyambung hidup.

Pendapat Jones (2009:142) juga sejalan dengan beberapa pemikiran sebelumnya bahwa di dalam kehidupan sosial ada interaksi sosial yang berlangsung antar individu-individu maupun dengan kelompok. Mereka yang berinteraksi menggunakan simbol-simbol yang kemudian diberi

interpretasi oleh yang terlibat dalam proses interaksi. Secara timbal balik terjadi interpretasi terhadap perilaku masing-masing serta dapat saling memahami.

Menurut Weber dalam Jones (2009: 114) bahwa dunia dimungkinkan keberadaannya karena ada tindakan sosial, Realitas sosial yang terbentuk merupakan hasil dari tindakan sosial. Sehingga perlu menjelaskan yang menjadi penyebab individu menentukan pilihan terhadap suatu tindakan.

Teori tindakan menurut Weber bahwa upaya untuk memahami bentuk tindakan sebagai ciri yang khas bagi suatu masyarakat merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk memahami masyarakat tersebut. Struktur sosial yang terbentuk di dalam suatu masyarakat merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dalam interaksi sosial. Sehingga perlu untuk

mengetahui makna yang ada dibalik peristiwa-peristiwa yang membentuk struktur sosial.

Menurut Jones (2009: 24) bahwa teori interpretif disebut juga teori tindakan yang menjelaskan tentang cara individu berinteraksi dalam hubungan sosial. Masyarakat tergantung pada interaksi antar individu. Keteraturan sosial adalah hasil dari interaksi antar individu. Masing-masing individu melakukan tindakan sosial yang dipilih berdasarkan interpretasi yang dilakukan. Pendapat Jones tersebut tidak bertentangan dengan pendapat Weber mengenai tindakan individu yang membentuk struktur. Menurut Weber bahwa untuk dapat memahami tindakan seseorang dapat digunakan metode *verstehen*, yakni kemampuan melakukan empati atau menempatkan diri dalam kerangka pikiran orang lain.

Tindakan sosial yang bagaimanapun bentuknya hanya dapat dipahami secara subyektif. Adapun motivasi individu dapat diketahui melalui tindakannya. Sehingga diperlukan kemampuan berempati dalam kerangka cara berpikir orang lain.

A. Teori Pilihan Rasional

Menurut Coleman dalam Ritzer (2015:365) bahwa sistem sosial harus dijelaskan oleh faktor individual. Sebab data dikumpulkan dari tingkat individual yang disusun membentuk data tingkat sistem sosial.

Teori pilihan rasional yang dijelaskan oleh Coleman menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perseorangan mengarah pada suatu tujuan menurut pilihan dan juga ditentukan oleh nilai kegunaan. Bahwa individu adalah pelaku rasional yang bertindak untuk kepentingannya sendiri.

Individu yang melakukan aktifitas ekonomi akan bertindak memaksimalkan tujuan yang akan mereka capai.

Teori pilihan rasional menjelaskan mengenai pilihan seseorang akan suatu tindakan sebagai bagian dari berbagai tindakan alternatif. Tindakan yang dipilih dianggap memiliki nilai serta probabilitas. Pilihan rasional akan dilakukan setelah mempertimbangkan nilai dan probabilitas yang akan dicapai. Sesuatu yang dianggap memiliki nilai yang fungsi belum tentu menjadi pilihan apabila memiliki probabilitas yang rendah. Pilihan akan ditujukan pada sesuatu yang probabilitasnya fungsi meskipun memiliki nilai dibawah yang yang fungsi.

Perempuan pedagang asongan menjatuhkan pilihan pada pekerjaan tersebut karena didasarkan pada pertimbangan menurut nilai dan kemungkinan atau kepastian pekerjaan berdagang asongan

sesuai dengan harapan. Terutama penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut.

B. Analisis Teori Jaringan Sosial

Menurut Saefuddin dalam Agusyanto (2007: 111) bahwa isu mengenai jaringan sosial menjadi sangat penting dalam kajian sosiologi yang relevan dengan pendekatan kualitatif interpretif. Pendekatan jaringan sosial memandang manusia sebagai sentral dalam kehidupan sosial sehingga manusia menjadi pusat analisis gejala sosial. Diantara manusia satu dengan yang lain menjalin hubungan sosial yang merupakan interaksi sosial yang berlangsung relatif cukup lama atau mungkin permanen. Di dalam interaksinya terdapat sesuatu yang dapat berupa barang, jasa, atau informasi.

Hubungan sosial yang terjaring diantara dua orang atau lebih yang diwujudkan dalam interaksi sosial ditandai oleh adanya

keteraturan akibat sesuatu yang menyebabkan keteraturan itu terjadi. Inilah yang disebut jaringan sosial sebab tingkahlaku yang diwujudkan dalam saling keterhubungan diantara mereka terdapat hak dan kewajiban yang mengaturnya. Jaringan sosial terjadi diantara manusia satu sama lain yang berlangsung dalam hubungan sosial. Individu sebagai anggota kelompok juga anggota masyarakat akan mewujudkan tindakan sosialnya yang berbeda dalam kelompoknya atau dalam masyarakatnya.

Seseorang dapat hidup dalam berbagai lingkungan sosial. Seperti lingkungan rukun tangga, rukun warga atau lingkungan pekerjaan. Masing-masing lingkungan sosial memiliki struktur sosial yang diwarnai oleh berbagai macam interaksi sosial yang terdapat pada hubungan sosial yang ada, baik pada kelompok maupun pada masyarakat.

Berdasarkan analisis Mitchell dalam Agusyanto (2007:28) bahwa konsep jaringan sosial dapat dikembangkan pada penelitian yang dilakukan di perkotaan terutama fenomena urban dan fenomena sosial yang kompleks. Demikian pula menurut Boot dan Barness dalam Agusyanto (2007:28) bahwa pemahaman jaringan-jaringan sosial dapat menjadi alat untuk melakukan interpretasi tindakan individu dalam berbagai situasi sosial yang luas.

Mengacu pada beberapa konsep tersebut kalau dihubungkan dengan pedagang asongan memang tidak bertentangan. Melakukan aktivitas berdagang asongan merupakan salah satu lingkungan sosial. Ada hubungan sosial yang tercipta melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam jaringan sosial. Masing-masing pedagang asongan akan mengembangkan hubungannya

menurut pengetahuan dan pengalamannya yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

Melalui jaringan sosial para pedagang asongan dapat memperoleh manfaat yang mendukung pekerjaannya. Bahkan diluar rutinitas pekerjaannya mereka tetap menjalin hubungan baik sebagaimana jalinan hubungan pada jaringan sosial yang dimaksud.

Menurut analisis Granovetter dalam Sukidin (2009:133) bahwa terdapat konsep “keterlekatan” pada perilaku ekonomi yang diwujudkan dalam hubungan sosial. Yang dimaksud konsep keterlekatan yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan dalam situasi sosial dan tindakan itu melekat dalam jaringan sosial dari masing-masing individu yang terlibat. Adapun jaringan hubungan sosial merupakan serangkaian hubungan yang berlangsung secara teratur yang terjadi pada individu-individu atau kelompok-kelompok.

Dijelaskan oleh Sukidin (2007:139) bahwa dalam perilaku ekonomi terdapat konsep kepercayaan (*trust*) sebagai moralitas yang bersifat umum untuk semua pelaku ekonomi. Sehingga semua pelaku ekonomi dalam tindakan ekonomi yang diwujudkan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan. Perilaku dapat dipercaya merupakan perilaku ekonomi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi. Pandangannya mengenai “keterlekatan” dalam hubungannya dengan kepercayaan yang diperoleh pelaku ekonomi adalah melalui proses antara individu-individu yang sudah lama terlibat secara bersama-sama dalam aktivitas ekonomi.

Bertambah atau berkurangnya transaksi dagang yang berlangsung antara pemberi modal dan pedagang pengecer merupakan gambaran tingkat kepercayaan yang terbina diantara mereka. Hal ini merupakan hasil dari

proses jaringan hubungan sosial yang berlangsung bukan sesaat terjadi dalam hubungan dagang tetapi sudah berlangsung lama.

Selanjutnya menurut Granovetter, Powell dan Smith dalam Sukidin (2007:140) bahwa keterlekatan perilaku ekonomi yang berlangsung dalam hubungan sosial berwujud pada jaringan sosial antara satu individu dengan individu yang lain. Wujud perilaku yang terlekat tersebut dapat memudahkan memperoleh sesuatu, atau sebagai perekat dalam kehidupan sosial karena memiliki makna yang bermanfaat secara sosial.

C. Fenomenologi

Pendukung fenomenologi mengatakan bahwa kenyataan sosial bergantung pada kesadaran subyektif aktor. Fenomenologi bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan kejadian yang terdapat pada

kehidupan sehari-hari yang disadari oleh aktor. Sekalipun kejadian yang diamati secara langsung dianggap berlangsung secara alamiah, fenomenologi dapat membuat analisis penyebab terciptanya kejadian tersebut, menurut Raho (2007:125).

Tindakan sosial terwujud pada saat aktor menyadari kehadirannya yang saling berinteraksi satu sama lain dan mereka memberi makna pada situasi yang dialami, menurut Weber dalam Raho (2007:133). Selanjutnya konsep *verstehen* menurut Weber adalah penafsiran serta pemahaman akan tindakan masing-masing ketika berlangsung interaksi sosial antar individu maupun antar kelompok. Masing-masing aktor saling memahami keadaan subyektifnya.

Menurut Schutz dalam Raho (2007:135) bahwa kenyataan sosial berupa dunia subyektif yang sama pada individu-individu yang sedang berinteraksi dapat tercipta

karena berlangsungnya intersubyektivitas. Individu-individu melakukan sesuatu seolah-olah melihat dunia dengan cara yang sama. Bahwa terdapat suatu dunia yang sama untuk semua orang. Menurut Ritzer (1992:70) bahwa intersubyektivitas antar individu atau kelompok yang saling berinteraksi yang memungkinkan terjadinya pergaulan sosial. Intersubyektivitas terjadi ketika masing-masing saling menginterpretasikan tindakannya. Menurut Schutz bahwa diperlukan kesadaran pada intersubyektivitas ketika terjadi saling interaksi dan saling memahami antar sesama manusia.

Perempuan pedagang asongan yang dijumpai di pelabuhan Parepare adalah bagian pedagang sektor informal khususnya yang berdagang di pelabuhan. Mereka juga adalah bagian dari orang-orang yang senantiasa beraktifitas di pelabuhan yang saling berinteraksi satu sama lain. Dengan sesama

pedagang asongan, dengan pedagang kaki lima, dengan pengunjung pelabuhan termasuk penumpang kapal, dan juga dengan para petugas pelabuhan. Masing-masing menyadari tujuan mereka berada di pelabuhan. Masing-masing saling menafsirkan dan memahami keberadaannya. Saling berinteraksi dan saling memahami keadaan subyektifnya.

Bagi perempuan pedagang asongan yang berharap barang dagangannya laku terjual, harus mampu menafsirkan serta memahami keadaan subyektif calon pembeli. Pedagang asongan harus mampu memahami keinginan pembeli sehingga berlangsung intersubyektivitas. Masing-masing melakukan tindakannya menurut cara menafsirkan dunianya. Fenomenologi berupaya memahami tindakan aktor dari sudut pandang aktor sendiri. Fenomenologi melihat perilaku manusia, yang dikatakan dan yang

dilakukannya sebagai hasil dari cara mereka melihat dunia yang dihadapinya.

D. Post Modern

Kaum feminis mengasumsikan bahwa semua perempuan di dunia memiliki kesamaan pengalaman karena diperlakukan dengan cara yang sama. Pandangan tersebut menepatkan perempuan secara sama, padahal perempuan akan berbeda karena berasal dari berbagai latar belakang sosial budaya yang berbeda. Menurut Jones (2009: 135) bahwa pendapat yang menurutnya semua perempuan adalah sama dapat dikatakan pendapat yang buta gender. Sebab peran gender perempuan ditentukan oleh budayanya. Sehingga hal inilah yang membedakan perempuan pada setiap masyarakat yang berbeda budaya. Yang sama pada semua perempuan adalah kodratnya. Peran gender perempuan tidak dapat

disamakan secara universal. Perempuan pada kelompok masyarakat tertentu akan mengalami hal yang spesifik dalam peran gendernya yang tidak akan dialami oleh semua perempuan di dunia. Perempuan pada masyarakat tertentu mengalami subordinasi, dominasi, atau diskriminasi, tetapi hal tersebut tidak dialami oleh perempuan pada masyarakat yang lain. Masalah yang dialami oleh perempuan tidak dapat diatasnamakan menjadi masalah untuk semua perempuan. Terdapat beraneka ragam pengalaman dan sikap yang dimiliki oleh perempuan yang tidak bersifat universal. Menurut Butler dalam Jones (2009:138) bahwa keanekaragaman pengalaman serta sikap yang terdapat pada perempuan seharusnya menjadi potensi baginya untuk diberdayakan, karena keanekaragaman dapat saling mengisi satu sama lain. Apabila perempuan disamakan untuk semuanya, akan tidak membantu

perempuan menyelesaikan masalahnya. Perempuan berasal dari masyarakat yang berbeda, memiliki pengalaman yang berbeda, mempunyai masalah yang berbeda sehingga ditangani pula dengan cara yang berbeda sesuai kebutuhannya. Berdasarkan penjelasan tersebut akan sesuai digunakan konsep post modern untuk menganalisis serta menjelaskan kehidupan perempuan yang menjalankan peran di rumah tangga dan juga sebagai pencari nafkah di luar rumah.

Penegertian post modern terdiri atas tiga makna yaitu; (1) Post modernitas (*post-modernity*) menjelaskan mengenai historis yang menyusul era modern; (2) Post modernisme yang menjelaskan mengenai produk kultural; (3) Teori sosial post modern yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan cara berpikir teori sosial post modern dengan teori sosial modern. Sehingga makna yang terdapat dalam pemikiran post modern

meliputi periode historis baru, produk kultural baru, serta teori yang baru mengenai kehidupan sosial. Dapat juga disebut sebagai teori mengenai suatu peristiwa yang telah mengalami perubahan.

Menurut Ritzer dan Goodman (2007: 629) bahwa generalisasi kesamaan pendapat dikalangan pemikir post modern tidak mudah dilakukan karena terdapat perbedaan keadaan atau hal yang bersifat ideosinkretik sehingga sesuatu menjadi berlainan. Menurut Smart dalam Ritzer dan Goodman (2007: 629) bahwa terdapat tiga jenis pendirian yang terdapat di kalangan pemikir post modern yaitu; (1) Bahwa masyarakat modern telah berakhir dan saat ini telah digantikan oleh masyarakat post modern; (2) Post modernisme terus berkembang seiring dengan modernisme; (3) Melihat modernisme dan postmodernisme sebagai zaman, keduanya saling berkaitan dalam waktu yang lama. Post

modernisme akan terus menunjukkan keterbatasan modernisme.

Adapun konsep Ritzer dan Goodman mengenai post modern (2007:630) menjelaskan bahwa; (1) Era modern telah berakhir dan saat ini manusia berada di era sejarah yang baru yaitu post modernitas. Hal tersebut ditandai oleh pemikiran bahwa untuk mengatasi berbagai masalah sosial tidak dengan cara rasional dan juga mesti terintegrasi. Sebagai contoh adalah masalah kemiskinan seharusnya diatasi dengan mengaitkannya dengan masalah yang lain. Dengan kata lain masalah tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan yang lain; (2) Post modernisme merupakan konsep yang berkaitan dengan dunia kultural yang menjelaskan bahwa produk post modern cenderung menggantikan produk modern; (3) Telah muncul teori sosial post modern yang mencari landasan relativistik, irrasional dan

nihilistik untuk analisisnya mengenai masyarakat.

Menurut Lyotard dalam Ritzer dan Goodman (2007: 631) bahwa postmodern tidak menerima gagasan mengenai narasi besar yang totalitas. Bahwa postmodern sebagai konsep yang mempetemukan atau dapat menerima berbagai perspektif teoritis yang berbeda. Ilmu pengetahuan post modern memiliki kepekaan akan perbedaan, tidak untuk saling membandingkan namun mampu untuk saling toleransi atas pandangan yang berbeda. Pemikiran Lyotard adalah untuk menjelaskan little narrative bukan narasi besar. Post modern tidak mengandalkan kekuatan pemikiran yang rasional, sebab mengedepankan rasionalitas akan menyebabkan kekakuan melihat perbedaan manusia yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri.

Dijelaskan pula oleh Lyotard dalam Sukidin (2009: 221) bahwa pemikiran post modern menerima realitas yang plural yang membiarkan bagian-bagian yang berbeda menurut logikanya masing-masing. Bahwa pemikiran post modern memberi pengakuan pada pluralitas, memiliki kepedulian terhadap historisitas, serta tidak menampik akan adanya relativisme. Pluralitas tidak memberi legitimasi akan pandangan yang universal namun memberi peluang kepada bagian-bagian yang berbeda untuk berkembang sendiri menurut logikanya masing-masing.

Menurut Wora dalam Suyanto (2011: 444) bahwa post modern didasarkan pada pemikiran akan keberagaman atau pluralisme yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Menurut Suyanto (2011: 444) bahwa pemikiran post modern termasuk relativis yang menjelaskan keberadaan individu yang berperan membentuk masyarakat. Pluralitas

atau keberagaman individu yang hidup bersama-sama dalam ruang serta waktu yang sama, serta kondisi masyarakat yang tidak memiliki format karena berjalan menurut logikanya masing-masing. Individu memiliki sikap yang terbuka untuk dapat menerima keberagaman.

Menurut Baudrillard (Ritzer & Goodman, 2007: 632) bahwa pemikiran post modern tidak sesuai dengan gagasan narasi besar. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa pemikiran post modern juga bertolak belakang dengan seluruh gagasan mengenai kehidupan sosial yang disebut juga metanarrative sosiologi yang menurut pemikiran modernitas.

Berdasarkan berbagai pemikiran post modern tersebut, menurut Ritzer dan Goodman (2007: 532) bahwa post modern tidak menerima gagasan narasi besar secara umum dan juga khususnya dalam analisis sosiologi.[]

7**Perempuan, Kerja & Dagang
Asongan****A. Perempuan Pekerja**

Menurut Alfin Tofler dalam Supardan (2007:142) bahwa perubahan akan terus terjadi sebab perubahan adalah fakta kehidupan. Perubahan tidak hanya penting bagi kehidupan sebab perubahan itu sendiri adalah kehidupan. Perubahan yang terjadi pada masyarakat sangatlah beragam. Untuk satu jenis perubahan ada yang berlangsung sangat cepat pada satu masyarakat dan berlangsung lama pada masyarakat yang lain.

Masyarakat akan terus berproses mengalami perubahan tanpa diketahui. Dan perubahan itulah yang akan abadi di dunia. tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri.

Menurut Sztompka (2004:65) bahwa masyarakat selalu berproses dan selalu mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada semua tingkat kompleksitas internalnya. Masyarakat terdiri dari seperangkat proses yang saling terkait satu sama lain. Ditingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultural. Ditingkat mezzo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi. Adapun di tingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual. Masyarakat akan selalu berubah dan perubahan ada setiap masyarakat. Setiap saat selalu ada masyarakat. Dimasa lalu, sekarang, dan dimasa yang akan datang. Masyarakat dimasa lalu ada kaitannya dengan masyarakat sekarang, dan masyarakat yang ada saat ini

berproses dan berkaitan dengan keberadaan masyarakat yang akan datang. Tidak terputus keterkaitan itu dan akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak dapat dipastikan.

Pekerjaan perempuan menurut Holzner (1997:250) selalu berada dalam konteks sosial yang senantiasa mengalami perubahan sosial, yang selanjutnya berhubungan dengan bentuk kerja perempuan yang lebih berkembang dan lebih terditerensiasi serta berkaitan dengan hubungan antar gender atau dalam gender yang sama untuk kelas sosial yang berbeda.

Bagi pedagang asongan melakukan mobilitas dalam pekerjaan merupakan strategi untuk dapat bertahan hidup. Mobilitas okupasi sangat berkaitan dengan keinginan memperoleh penghasilan yang lebih banyak dari pekerjaannya. Bahkan mobilitas okupasi juga sering diikuti dengan mobilitas geografi yang melakukan migrasi untuk memperoleh pekerjaan yang baru dengan harapan

memperoleh penghasilan yang lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. Memutuskan untuk melakukan mobilitas okupasi merupakan gabungan dari pertimbangan kekuatan sentrifugal dan kekuatan sentripetal terhadap keputusan yang diambil.

Menurut Mantra (1995:12) bahwa adanya perbedaan dari segi ekonomi menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Melakukan mobilitas bagi penduduk yang berpenghasilan rendah karena berharap dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik pendapatannya, sehingga mobilitas yang terjadi bukan hanya perubahan tempat bekerja, tetapi juga perubahan jenis pekerjaannya. Bagi pedagang kaki lima yang beralih pekerjaan menjadi pedagang asongan merupakan bentuk mobilitas okupasi yang menunjukkan sistem perdagangan yang fungsional. Dapat menjadi

sistem yang efisien karena berfungsi adaptif terhadap kondisi di pelabuhan Parepare. Satu sama lain dapat saling dipertukarkan. Memang lebih banyak penghasilan yang diperoleh kalau berdagang asongan sehingga lebih diminati dari pada berdagang kaki lima. Tetapi jika situasinya hanya memungkinkan berdagang kaki lima berarti harus menerima keadaan sampai ada kebijakan yang mengizinkan dapat berdagang asongan.

B. Perempuan di Sektor Informal

Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting apabila dibandingkan dengan perbedaan menurut golongan-golongan lainnya seperti menurut ras, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya. Banyak orang yang berasal dari golongan yang berbeda dapat berbaur satu sama lain dan dapat menjadi satu karena mempersatukan diri yang mungkin

berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Namun perbedaan antara laki-laki dan perempuan akan tetap ada.

Menurut Robert Bierstedt dalam Suryochondro (1984:24) bahwa di dunia barat pun masih sering terjadi pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Pada mulanya mereka menyatu yang selanjutnya memisahkan diri menurut jenis kelamin tanpa disengaja maupun direncanakan. Hal tersebut dapat dilihat dilingkungan pergaulan. Kelompok laki-laki senang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan politik dan perdagangan. Adapun kelompok perempuan biasanya membicarakan hal-hal mengenai keluarga, rumah tangga, dan pakaian.

Demikian pula menurut Giddings dalam Surychondro (1984:25) yang menjelaskan bahwa tidak lagi terjadi perbedaan yang tajam antara laki-laki dan perempuan di dunia pekerjaan, mereka memiliki peluang yang

sama. Namun pengelompokan akan terjadi dalam hal jenis kelamin. Menurut Giddings yang menyebabkan terjadinya pengelompokan tersebut pada dasarnya adalah “*Consciousness of kind*”.

Dalam tulisan Suryochondro (1984:111) menjelaskan bahwa perempuan Indonesia selalu memiliki semangat untuk lebih baik karena pengalaman masa lalu yang serba sulit. Sejak jaman penjajahan Belanda sampai pada masa Jepang menduduki wilayah Indonesia, perempuan selalu berjuang untuk memajukan bangsanya. Sampai hari inipun perempuan senantiasa berjuang untuk lebih memperbaiki kehidupannya. Di jaman penjajahan Belanda ada organisasi yang diprakarsai oleh golongan perempuan Belanda yang berusaha menaikkan derajat perempuan seperti perkumpulan untuk hak pilih sebagai bagian pergerakan wanita Indonesia. Adapula perkumpulan wanita rumah tangga namun

tidak dianggap bagian dari pergerakan wanita Indonesia. Rupanya yang menjadi pertimbangan untuk memasukkan organisasi atau kelompok yang dibentuk oleh perempuan ke dalam organisasi formal apabila kelompok yang dimaksud melakukan kegiatan bukan untuk pekerjaan rumah tangga. Padahal mereka juga tetap menjunjung tinggi nilai persatuan, nilai perikemanusiaan, bahkan nilai kebangsaan. Perempuan bukan hanya menginginkan kemajuan atau diskriminasi dihilangkan, namun mereka merasa bertanggungjawab akan kewajibannya yang dikodratkan kepadanya sebagai ibu.

Indonesia adalah negara yang banyak memiliki tokoh perempuan sejak jaman penjajahan Belanda yang senantiasa berjuang untuk membangun bangsanya. Berbagai prestasi yang dicapai namun tetap menjalankan peran utamanya sebagai isteri, ibu rumah tangga, sebagai pendidik dalam

keluarga yang merupakan figur sentral bagi perempuan. Kalaupun perempuan melakukan aktivitas diluar rumah bukan hanya karena alasan ekonomi sebagaimana yang ditemui dari beberapa penelitian, namun ada banyak perempuan yang mengambil peran diluar rumah karena didorong oleh keinginan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, karena ingin mengembangkan diri, memanfaatkan kesempatan bersosialisasi dengan lingkungan tertentu, atau mengisi waktu luang.

Menjadikan perempuan sebagai topik pembicaraan memang memiliki daya tarik tersendiri. Menurut Kardinah (1993:24) bahwa membahas mengenai perempuan tidak akan ada habisnya sejak dulu hingga sekarang dan terjadi diseluruh dunia. Persoalan tentang perempuan merupakan bagian dari proses pembangunan itu sendiri, untuk memecahkan persoalan yang dimaksud terdapat keterkaitan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan.

Yang selanjutnya menurut Kardinah (1993:27) bahwa terdapat inter-relasi dan *inter-influence* berbagai faktor dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh perempuan sehingga orang cenderung menggunakan pendekatan terpadu.

Penulis tidak menjumpai tulisan yang membedakan pengertian antara perempuan dan wanita. Sehingga antara kedua kata tersebut memang berbeda namun memiliki makna yang sama. Menurut Kardinah (1993:28) wanita adalah lambang penegak bangsa dan negara. Wanita adalah tiang negara dan bangsa. Kecerdasan wanita adalah kekuatan negara dan bangsa. Wanita adalah pendidik putera-putrinya. Wanita adalah manajer rumah tangga. Dan wanita adalah pencari nafkah rumah tangga tanpa mengabaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Wanita adalah *the key person in the family* (sebagai isteri, ibu, kawan, pendidik,

manajer rumah tangga, majikan, dan lain sebagainya).

Terdapat beberapa peranan wanita yang dapat dijumpai pada masyarakat manapun. Menurut Oppong dan Chuch dalam Muta'ali (2001:103) bahwa terdapat 7 (tujuh) peran perempuan yang secara garis besar terdiri atas peran yang berorientasi pada peran keluarga serta yang berorientasi pada masyarakat luas. Adapun peran yang dimaksud adalah: (1) peran sebagai orang tua (*parental role*), (2) peran sebagai istri (*conjugal role*), (3) peran di dalam rumah tangga (*domestic role*), (4) peran di dalam kekerabatan (*kin role*), (5) peran pribadi (*individual role*), (6) peran di dalam masyarakat, dan (7) peran di dalam pekerjaan (*occupational role*), sehingga dapat dikatakan bahwa peran perempuan sangat besar dalam keluarga serta masyarakat. Tidak hanya berperan pada diri sendiri, namun terlebih terhadap keluarga juga masyarakat.

Menurut Martha L. Shockey dalam Paula J. Dubeck and Kathryn Borman (1997:7) bahwa dijumpai banyak perempuan yang bekerja mencari nafkah secara paruh waktu. Hal ini merupakan salah satu faktor sosial yang terjadi pada masyarakat dunia. Perempuan pekerja diharapkan dapat menyeimbangkan perannya dalam keluarga serta dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka diluar rumah. Kerja paruh waktu sangat meningkat di sebagian besar negara maju seperti Amerika Serikat. Ada pertimbangan sehingga membatasi pekerja perempuan memilih pekerjaan yang dianggap beresiko. Pertimbangan yang dimaksud adalah: Pertama, pemahaman budaya yang menentukan bahwa perempuan harus memprioritaskan perannya dalam keluarganya. Kedua, kebijakan nasional yang membangun jaringan secara aktif memasukkan perempuan pada pekerjaan

paruh waktu. Ketiga, permintaan pasar yang banyak berminat pada pekerja paruh waktu.

Adapun menurut Nanette Page dalam Paula J. Dubeck and Kathryn Borman (1997: 13) bahwa yang dimaksud perempuan kelas pekerja adalah kedudukan seorang perempuan pekerja dalam suatu pekerjaan berdasarkan etnis, gender, dan ras. Banyak hal penting yang biasanya dihadapi seperti meningkatnya pertumbuhan perempuan pekerja di sektor jasa serta meningkatnya pengangguran sukarela. Perempuan terkadang mengalami berbagai hal dalam bekerja karena tanggungjawabnya mengatur pekerjaan di rumah serta mengatur penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya. Kepentingan keluarga selalu menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan untuk bekerja mencari nafkah. Meskipun perempuan membutuhkan penghasilan dari pekerjaannya, namun mereka tidak menginginkan eksploitasi

ditempat kerja. Kekuatan kelas pekerja perempuan adalah karena memiliki keberanian dan tekad, sehingga harus menjadi perhatian jangan sampai merendahkan mereka dan mestinya memberi bayaran atau imbalan yang sesuai terhadap pekerjaan yang mereka lakukan.

Menurut Schneider Barbara and Schmidy A. Jennifer dalam Dubeck J. Paula and Kathryn Borman (1997:17) yang menjelaskan bahwa perempuan yang berusia muda mempunyai arti penting dalam meningkatkan penghasilan ditempat mereka bekerja. Disaat usia mereka masih muda dan mulai menekuni pekerjaan karena motivasi ingin memperoleh penghasilan, tentu mereka akan memiliki perilaku yang menarik untuk diamati seperti tindakan dan motivasi mereka menjalankan jenis pekerjaan tertentu. Pengalaman bekerja akan mempengaruhi cara mereka dalam menilai dirinya serta menilai

orang lain. Mereka yang bekerja di usia muda kemungkinan akan bekerja untuk jangka waktu yang panjang yang sudah dipikirkan jauh kedepan. Terlebih lagi jika mereka melanjutkan pendidikan yang mendukung pekerjaannya tentunya memberikan wawasan signifikan dalam pembentukan sikap serta menjadikan nilai-nilai tertentu sebagai pedoman yang bermanfaat terhadap pekerjaan yang mereka lakukan.

Demikian pula menurut Bielby D. Denise dalam Dubeck J. Paula and Kathryn Borman (1997:288) yang menjelaskan bahwa perempuan yang bekerja mencari nafkah memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya. Mereka memiliki komitmen dengan berusaha menyeimbangkan antara bekerja dengan keluarganya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perbedaan gender tidak lagi ditemukan ketika perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk

bekerja mencari nafkah. Bahwa tidak benar anggapan banyak orang yang mengatakan kalau perempuan pekerja yang selalu memperhatikan urusan keluarganya tidak akan mampu mempertahankan komitmen dalam menjalankan pekerjaannya. Sebab mereka dapat menyeimbangkan komitmen dalam menjalankan pekerjaannya mencari nafkah dengan tugas-tugas yang harus dijalankan dalam mengurus keluarganya.

Bekerja merupakan keharusan untuk tetap mempertahankan hidup dan sangat berhubungan dengan pekerjaan yang dapat dijalankan oleh seseorang. Menurut Harris Kessler Alice dalam Bonnie G. Smith (2004:145) bahwa dapat dilihat pada setiap masyarakat adanya pekerjaan yang dijalankan oleh berbagai orang yang bekerja. Ada pekerja yang produktif juga adapula yang tidak produktif karena tidak dibayar sedikitpun atas pekerjaannya. Seiring berjalannya waktu telah

terjadi perubahan terutama dalam aktivitas ekonomi yang seakan tidak ada perbedaan lagi antara laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki peluang yang sama untuk bekerja. Hal ini dianggap sebagai perubahan alami terutama mengatasi kondisi ekonomi baik skala lokal maupun skala internasional. Sehingga dituntut memiliki kemampuan daya saing serta mampu mengadaptasikan diri dalam pekerjaan. Ketersediaan lapangan kerja semakin terbuka bagi perempuan. Orang tidak lagi terjebak dalam kebiasaan pikiran bahwa siapa yang akan mengisi kesempatan untuk pekerjaan tertentu atau siapa saja yang dapat diberi pelatihan. Tidak ada lagi pertimbangan untuk membedakan laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan.

Menurut Sri Mulyani (1995:53) bahwa perkembangan ekonomi akan diikuti peningkatan jumlah tenaga kerja. Partisipasi tenaga kerja perempuan yang semakin

meningkat disebabkan oleh penerimaan sosial terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah. Kaum perempuan terus diberi peluang untuk berperan di masyarakat. Sehingga prestasinya seringkali tidak hanya diukur dalam keberhasilan mengelola rumahtangga tetapi juga dalam membina karier. Kecenderungan perempuan bekerja diluar rumah pada umumnya didorong oleh keinginan memperoleh penghasilan. Dalam teori ekonomi bekerja diartikan sebagai bekerja yang menghasilkan uang dan tidak menggunakan waktu untuk leisure. atau waktu yang tidak menghasilkan uang. Perempuan memiliki fungsi yang unik. Sebab mampu dalam reproduksi, menjalankan pekerjaan dalam rumah tangga, serta bekerja diluar rumah mencari nafkah, bahkan adapula yang aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat.

Menurut Holzner dalam Saptari dan Holzner (1997:333) menjelaskan bahwa eksploitasi sering dialami oleh perempuan dalam bekerja mencari nafkah. Pekerjaan perempuan dianggap ringan, mudah dan sifatnya sampingan. Selanjutnya juga dijelaskan oleh Holzner (1997:395) bahwa dalam pekerjaan berdagang, perempuan menempati hierarki yang rendah. Meskipun perempuan memiliki modal yang besar, peran suami dan anak laki-laki masih dirasa sangat penting dalam membuka jalur untuk pemasaran atau jalur untuk mendapatkan barang yang harganya lebih murah untuk dijual kembali.

Menurut Agus J. Pitoyo (1999:73) bahwa derasnya arus mobilitas yang dilakukan oleh penduduk yang mencari pekerjaan sering tidak diimbangi oleh ketersediaan kesempatan kerja secara luas, sehingga banyak tenaga kerja hanya dapat ditampung pada sektor

informal. Orang akan selalu berusaha memperoleh peluang untuk mengadu nasib ditempat yang menjanjikan harapan hidup yang lebih baik. Kota memiliki daya tarik karena faktor ekonomi yang mendorong tingginya laju mobilitas penduduk.

Peningkatan arus migrasi diakibatkan oleh pemusatan kegiatan industri di kota serta perdagangan sektor informal yang memberi kesempatan mencari nafkah. Menurut Tadjuddin N. Effendi (1995:41) bahwa sektor informal adalah lapangan kerja yang diciptakan sendiri serta terlibat langsung dalam memproduksi dan distribusi barang serta jasa melalui kegiatan kecil-kecilan. Adapun ciri-ciri suatu aktifitas perdagangan disebut termasuk sektor informal menurut Hidayat dalam Tadjuddin N. Effendi (1995:41) yaitu:

1. Kegiatan usaha yang tidak terorganisasi dengan baik, tanpa bantuan fasilitas dari sektor formal.
2. Pada umumnya tidak memiliki izin usaha.
3. Tidak memiliki tempat usaha yang tetap serta jam kerja yang tidak menentu.
4. Pada umumnya tidak tersentuh kebijakan pemerintah.
5. Teknologi yang digunakan masih tradisional.
6. Modal serta operasional usaha yang dijalankan relatif kecil
7. Yang dibutuhkan adalah pendidikan dan pengalamannya bekerja, bukan pendidikan formal.
8. Menjalankan usahanya sendiri dan biasa dibantu oleh buruh dari keluarganya.
9. Modal dari swadaya atau dari lembaga keuangan tidak resmi.
10. Hasil produksinya atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen di kota atau

di desa yang berpenghasilan rendah sampai menengah.

Apabila dibedakan jenis pekerjaan sektor formal dan sektor informal secara spesifik menurut Tadjuddin N. Effendi (1995:98) terdapat ciri yang menonjol dan merupakan pengklasifikasian untuk lingkungan Indonesia. Bahwa yang dimaksud sektor informal adalah yang bekerja untuk pemerintah atau untuk perusahaan, memperoleh gaji secara tertentu, mempunyai stabilitas pekerjaan, serta mendapat status sosial. Adapun sektor informal adalah bekerja untuk orang lain atau usaha sendiri, tidak memiliki jam kerja tertentu, serta sistem pengupahan yang tidak tetap.

Yang menjadi penyebab munculnya sektor informal menurut Castells & Portes dalam Agus J. Pitoyo (1999:73) adalah; 1) sektor informal sebagai kegiatan individu yang memberikan reaksi kepada ekonomi skala

besar dan terorganisasi; 2) sektor informal bebas dari pajak dan tidak memiliki jaminan hukum untuk usaha; 3) sektor informal tidak perlu berkompetisi secara nasional dan internasional karena merupakan usaha sendiri yang tingkat kompetisinya rendah; 4) sektor informal merupakan unit usaha bayangan akibat modernisasi dan industrialisasi; 5) sektor informal sebagai usaha alternatif berskala kecil sebagai akibat dari krisis ekonomi.

Menurut Chris Manning dalam Pitoyo (1999:81) bahwa kualitas tenaga kerja sektor informal yang kurang menyebabkan sektor tersebut kurang berkembang. Namun demikian sampai saat ini sektor informal memiliki fleksibilitas serta mampu bertahan. Meskipun mereka kurang berkualitas terpaksa harus bekerja dengan mengandalkan fisik serta modal usaha yang kecil, sehingga tidak memiliki posisi tawar yang kuat.

Selanjutnya menurut Berger dan Buvinic dalam Pitoyo (1999:87) bahwa sektor informal dapat dianalisis dari berbagai pendekatan antara lain salah satunya yaitu *theory of excess labor supply*, yang menjelaskan bahwa sektor informal muncul karena sektor formal tidak mampu menyerap semua tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena sektor formal memberi persyaratan tertentu yang tidak semua pencari kerja dapat memenuhi syarat tersebut. Mereka kemudian menciptakan lapangan kerja sendiri sesuai kemampuannya.

Menurut Manning dan Effendi (1996:92) bahwa partisipasi kaum perempuan di sektor informal lebih kecil dari pada laki-laki. Namun untuk perdagangan sektor informal lebih banyak diminati oleh kaum perempuan. Apabila sektor informal dihubungkan dengan migrasi tampaknya laki-laki migran yang cenderung memasuki sektor tersebut.

Sektor informal tidak dapat dipandang sebagai sektor parasit yang memperburuk wajah kota, yang menyebabkan kemacetan, atau yang mengganggu ketertiban. Sektor informal memiliki posisi strategis dalam mata rantai produksi antara produsen dan konsumen. Memiliki elastisitas dan ketahanan sebab mampu menampung tenaga kerja tanpa harus membebani siapa pun. Menurut Ray Bromley dalam Manning dan Effendi (1996: 288) bahwa pekerja sektor informal yang berdagang kaki lima sangat berhubungan dengan proses urbanisasi, kesempatan kerja, serta perencanaan kota. Pedagang kaki lima dianggap sebagai wujud pengangguran tersembunyi, merupakan parasit serta tergolong rakyat jelata dan merupakan korban kelangkaan kesempatan kerja yang produktif.

Berdasarkan telaah teori yang dilakukan oleh Agus Dwiyanto, dkk (1996:256) diungkapkan bahwa untuk mengkaji

pembangunan perkotaan perlu mengetahui hubungan antara pertumbuhan penduduk dan perkembangan sektor informal yang ada di kota. Pertumbuhan penduduk menyangkut migrasi desa-kota. Kajian tersebut menjelaskan bahwa; 1) arus angkatan kerja dari pedesaan memasuki sektor informal merupakan gejala positif yang melahirkan benih-benih kewiraswastaan pengusaha pribumi. Sektor informal sebagai pelengkap, penunjang, dan sumber potensi perekonomian di kota. Sektor informal menghasilkan dan menyediakan barang untuk sektor formal, yang selanjutnya sektor formal mengolah barang tersebut dengan menggunakan tenaga kerja migran di kota. Sektor informal akan berkembang menjadi sektor formal seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kota; 2) tidak ada hubungan antara sektor formal dengan sektor informal di kota. Sektor informal tidak memiliki akses pada produksi

dan pemasaran akibat kebijakan ekonomi makro yang memihak kepada pengusaha besar. Ekonomi kota terintegrasi dengan sistem ekonomi dunia dan sektor informal hanya mampu sebagai tenaga kerja (buruh).

Faktor ekonomi sebagai daya tarik kota yang merupakan salah satu faktor yang mendorong tingginya laju mobilitas penduduk. Orang akan selalu berusaha mencari peluang untuk mengadu nasib ditempat yang menjanjikan harapan hidup yang lebih baik. Semakin tingginya laju perpindahan penduduk ke kota besar merupakan dampak modernisasi dan industrialisasi. Perkembangan kota dan keterbatasan kesempatan kerja di desa akibat ekonomi perkotaan juga menjadi penyebab penduduk dari desa melakukan mobilitas baik sirkuler maupun permanen. Ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja pada sektor formal yang

menyebabkan banyak tenaga kerja hanya dapat ditampung pada sektor informal. Kota menjadi tujuan mencari lowongan kerja karena perdagangan sektor informal di perkotaan yang semakin memberikan kesempatan kepada para pencari kerja. Menurut Effendi (1995:91) bahwa sektor informal merupakan lapangan kerja yang diciptakan dan dijalankan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Adapun ciri-cirinya yang sesuai dengan pengklasifikasian di Indonesia adalah usaha yang dijalankan sendiri tanpa ketentuan jam kerja.

Beberapa penyebab munculnya sektor informal menurut Castells & Portes dalam Pitoyo (1999: 73) yaitu; 1) sektor informal sebagai kegiatan individu yang memberikan reaksi kepada ekonomi skala besar dan terorganisasi, 2) sektor informal bebas dari pajak dan tidak memiliki jaminan hukum untuk usaha, 3) sektor informal tidak perlu

berkompetisi secara nasional dan internasional karena merupakan usaha sendiri yang tingkat kompetisinya rendah, 4) sektor informal merupakan unit usaha bayangan akibat modernisasi dan industrialisasi. Menurut Schmitz dan Nugroho dalam Pitoyo (1999: 80) bahwa sumber daya manusia, manajemen, usaha dan koordinasi merupakan kelemahan sektor informal secara internal. Adapun kelemahannya secara eksternal karena dianggap subordinat sektor formal dan kurang mampu bersaing dengan sektor formal.

Terdapat dua paradigma yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sektor formal dengan sektor informal yaitu; 1) paradigma harmoni yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat transisi terdapat dua sistem sosial. Ada yang menggambarkan keterbelakangan atau tradisionalisme, dan juga ada yang merupakan

sistem yang telah maju atau modern. Dua sistem yang berbeda tersebut saling menjaga keseimbangan untuk senantiasa berada dalam hubungan simbiosis mutualisme. Dua sistem tersebut saling memberikan keuntungan secara sosial dan ekonomi; 2) paradigma konflik menjelaskan bahwa ada ketergantungan sektor informal terhadap sektor formal yang disebut model dependensia. Pada perkembangan selanjutnya sektor informal mampu bertahan sebagai penyangga bagi yang tidak tertampung pada sektor formal. Hal tersebut dikarenakan sektor informal dapat melakukan substitusi dan fleksibilitas.

Istilah sektor informal pertama kali dipopulerkan oleh Hart yang menjelaskan bahwa sektor informal merupakan bagian angkatan kerja di kota yang berada diluar pasar tenaga kerja yang terorganisir.

C. Migrasi dan Kerja

Everett S. Lee (1995:7) menjelaskan bahwa pengertian migrasi dalam arti luas adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen tanpa ada pembatasan dalam jarak pindah, sukarela atau terpaksa, terjadi di dalam negeri atau keluar negeri. Berbagai alasan menyebabkan orang melakukan migrasi. Pengaruh yang paling kuat adalah karena alasan ekonomi. Orang bermigrasi ke daerah yang dapat memberi peluang untuk hidup lebih baik. Pada umumnya mereka memasuki wilayah yang dapat menampung mereka, terutama daerah pusat-pusat perdagangan bagi yang ingin menjalankan usaha aktivitas berdagang, serta pusat-pusat industri bagi yang berharap dapat bekerja sebagai tenaga kerja karyawan atau buruh.

Perempuan pada umumnya lebih memilih lokasi yang dekat dengan daerah asalnya sebagai tujuan migrasi dengan pertimbangan dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaannya di rumah serta dengan mudah pula menjangkau tempatnya bekerja mencari nafkah. Dengan kata lain tidak jauh dari keluarga sehingga komunikasi berjalan dengan baik dan lancar.

Adapun penjelasan Michael P. Todaro (1996:12) bahwa keputusan yang dilakukan penduduk desa untuk bermigrasi ke kota terutama sekali berdasarkan perhitungan ekonomi rasional meskipun terjadi pengangguran yang sangat tinggi di perkotaan. Bahwa migrasi akan selalu berlangsung akibat penghasilan yang berbeda antara desa dengan kota. Mereka berpikir tentang penghasilan yang diharapkan dari bermigrasi karena perbedaan pendapatan dan peluang kerja dikota, meskipun tidak selalu mereka yang

bermigrasi ke kota akan memperoleh pekerjaan sesuai yang diharapkan. Sebab berbagai syarat untuk dapat diterima bekerja belum tentu dipenuhi.

Hal ini yang mengakibatkan adanya pengangguran di kota, sehingga mencari berbagai alternatif pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Kembali ke desanya tanpa membawa hasil akan menjadi beban karena dianggap tidak berhasil.

Michael P. Todaro (1996:22) juga menjelaskan bahwa alasan mereka yang bermigrasi ke kota karena pertimbangan psikologis. Mereka berusaha meninggalkan daerah asalnya untuk bisa memperoleh penghasilan yang lebih baik, dan merasa malu untuk kembali desanya kalau belum mendapatkan penghasilan yang diharapkan tersebut.

Migrasi antar daerah yang dilakukan oleh perempuan menunjukkan adanya

peningkatan status serta perannya dalam rumah tangga. Sebagaimana menurut Hugo dalam Setiadi (2001:23) bahwa tujuan perempuan melakukan migrasi tidak semata-mata untuk tujuan ekonomi, tetapi juga ingin memperoleh kebebasan yang lebih luas dalam meningkatkan status dan perannya dalam rumah tangga. Dapat diasumsikan bahwa keputusan perempuan untuk bermigrasi dapat meningkatkan statusnya serta memungkinkan terjadinya pergeseran relasi gender diantara perempuan dengan keluarganya. Perubahan akan terjadi dalam pola-pola hubungan keluarga.

Menurut Pelly dalam Tarigan (2001: 3) yang menjelaskan bahwa fokus kajian sosiologi yang dijumpai pada aktifitas migrasi adalah kemampuan migran menghadapi berbagai tantangan serta upaya memperoleh pekerjaan di daerah tujuan dan juga mampu menyesuaikan diri di lingkungan sosial yang

baru dan berbeda di daerah tujuan. Setelah terjadi pembauran dengan berbagai macam identitas kultural maka akan terjadi asimilasi diantara mereka. Satu sama lain bisa saling menghargai setelah melalui proses adaptasi.

Terjadinya mobilitas penduduk merupakan akibat perkembangan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah yang menjadi daerah tujuan. Menurut Aris Ananta (1995:122) dijelaskan bahwa biasanya mobilitas penduduk berawal dari mobilitas non permanen jarak pendek disertai waktu yang tidak lama, selanjutnya terjadi mobilitas jarak jauh dengan tujuan untuk menetap.

Selanjutnya Aris Ananta (1995:167) menjelaskan bahwa suku Bugis serta masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dikenal sebagai petualang terutama ke kota perdagangan yang tersebar di Indonesia. Aktivitas berdagang sudah menjadi hal yang banyak dijumpai pada masyarakat secara

luas. Dari seluruh jumlah penduduk Sulawesi Selatan terdapat diantaranya yang bekerja diluar daerah alasannya terutama sebagai pedagang, tidak terkecuali perempuan yang termasuk di dalamnya. Mereka berdagang sebab sektor informal tersebut lebih memberikan peluang daripada sektor formal.

Dijelaskan pula oleh Aris Ananta (1995:174) bahwa frekuensi mobilitas penduduk dapat pula diamati setiap hari di jalan raya yang menghubungkan suatu daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Banyak orang dari berbagai macam kesibukan pekerjaan akan melintas di jalan raya. Ada yang bekerja sebagai pedagang, pegawai, atau pelajar. Pada pagi hari mereka menuju ke kota dan balik lagi ke desa pada sore atau malam hari. Ini yang disebut sebagai mobilitas sirkuler karena tidak menetap ditempat tujuan. Ada beberapa alasan yang menjadi

penyebab seseorang melakukan mobilitas sirkuler. Alasan yang dimaksud yaitu:

1. Adanya kekuatan sentrifugal yang seimbang dengan kekuatan sentripetal.

Kekuatan sentrifugal merupakan kekuatan yang mendorong seseorang atau penduduk untuk meninggalkan daerah asalnya. Adapun kekuatan sentripetal merupakan kekuatan yang mengikat seseorang untuk tetap tinggal di daerah asalnya. Meninggalkan desanya menuju ke kota untuk memperoleh kesempatan kerja karena sektor pertanian di desa tidak dapat diharapkan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mencari pekerjaan di kota sebagai solusi yang diharapkan. Meskipun tidak dapat tinggal secara permanen di kota sebab desa asalnya masih menyimpan berbagai harapan seperti kuatnya jalinan persaudaraan dan kekeluargaan serta

masih ada tanah pertanian meskipun tidak seberapa luasnya.

2. Prasarana transport yang menghubungkan wilayah kota dengan wilayah desa yang selalu mengalami perbaikan. Hal tersebut memungkinkan tarif angkutan relatif murah, serta lalulintas yang semakin lancar.

Adapun menurut Suharso dalam Mantra (1995:178) bahwa urbanisasi yang terjadi di Indonesia tidak seiring dengan ketersediaan lapangan kerja di kota. Harapan migran yang datang ke kota pada umumnya untuk memperoleh pekerjaan, sehingga meskipun dengan imbalan yang rendah bahkan tidak menentu para migran tersebut sudah merasa teratasi dari persoalan memperoleh pekerjaan.

Kesempatan kerja di perkotaan pada sektor industri tidak banyak menampung pekerja pendatang maupun penduduk kota sendiri. Kegiatan industri yang cenderung

padat modal, teknologi tinggi, serta keterampilan yang harus dipenuhi tidak mudah bagi para pencari kerja sehingga sebagian besar diantara mereka menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal. Dengan pertimbangan daripada menganggur sehingga berusaha menciptakan lapangan kerja sendiri, dalam memproduksi serta distribusi barang maupun jasa dalam skala yang kecil-kecilan. Keterbatasan dalam hal modal dan keterampilan membuat mereka mau melakukan pekerjaan apa saja yang mereka mampu tanpa harus mempertimbangkan besaran nominal penghasilan yang akan diperolehnya. Yang penting memiliki pekerjaan dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya.

D. Pedagang Asongan

Pedagang adalah seseorang yang melakukan aktivitas dagang sebagai salah

satu mata pencaharian yang menjual dan membeli satu produk atau barang kepada pembeli atau konsumen yang dilakukan melalui transaksi langsung maupun tidak langsung, yang berskala besar sampai pada yang berskala kecil atau pedagang kecil-kecilan. Pedagang asongan adalah termasuk pedagang kaki lima yang bergerak pada sektor informal yang menjual dagangannya secara berjalan atau berpindah-pindah tidak menetap di suatu tempat tertentu serta memiliki besaran dagangan yang berskala kecil. Pekerjaan tersebut sangat populer bagi tenaga kerja yang berusaha memiliki pekerjaan tanpa harus dengan modal besar, tidak harus dengan keterampilan khusus, serta tidak membutuhkan pendidikan level tertentu.

Pedagang sektor informal dapat digolongkan dalam tiga kategori, menurut Dean Forbes dalam Manning dan Effendi (1996:355) yaitu: penjual borongan (atau

punggawa), pengecer besar, dan pengecer kecil. Punggawa adalah para wiraswasta yang dapat memberi modal serta mengorganisir pendistribusian barang-barang dagangan. Pengecer besar terdiri atas pedagang-pedagang besar serta pedagang pasar yang memiliki tempat yang tetap dalam menjalankan usahanya. Adapun pengecer kecil adalah pedagang kecil sektor informal yang biasanya berjualan diluar pasar, ditepi jalan serta kios-kios dipinggiran jalan. Berdasarkan penjelasan tersebut pedagang asongan dapat dikategorikan sebagai pengecer kecil yang disebut juga penjaja menurut Dean Forbes dalam Manning dan Effendi (1996:358).

Menurut Weber dalam Damsar (1997:103) bahwa seseorang dianggap melakukan tindakan ekonomi apabila ia memperhatikan orang lain melalui makna yang dibangun secara sosial.

Menurut kajian sosiologi ekonomi yang diungkapkan oleh Damsar dan juga Geertz, Mai, Buchholt dalam Damsar (1997:107) bahwa pedagang dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaan serta pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya berdagang serta hubungannya dengan kehidupan ekonomi keluarga pedagang yang bersangkutan. Adapun klasifikasi yang dimaksud bahwa pedagang dibagi atas:

- Pedagang profesional yaitu pedagang yang menjalankan aktivitas perdagangan sebagai pekerjaan satu-satunya yang pendapatannya merupakan sumber utama bagi perekonomian keluarga. Pedagang profesional biasanya berperan sebagai pedagang distributor, pedagang (partai) besar, atau pedagang eceran.
- Pedagang semi profesional yaitu pedagang yang menganggap pendapatan yang diperoleh dari aktivitas berdagang sebagai

sumber tambahan perekonomian keluarganya. Baik sebagai sumber tambahan yang sifatnya utama/pokok maupun sebagai sumber tambahan sampingan yang tidak banyak berpengaruh pada ekonomi keluarganya.

- Pedagang subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil pekerjaannya sebagai petani, nelayan, atau tukang loak yang tidak dalam skala besar. Hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok para pembeli yang selanjutnya hasil dari penjualan tersebut dibelanjakan lagi untuk membeli kebutuhan pokoknya sendiri atau kebutuhan-kebutuhan subsistensi.
- Pedagang semu yaitu pedagang yang menjalankan aktivitas berdagang karena merupakan hobi atau sekedar mengisi waktu luang.

Pedagang semu adalah orang yang menjalankan aktivitas dagang tanpa

mengharapkan keuntungan finansial. Mungkin saja mengalami kerugian namun bukan masalah bagi mereka sebab berdagang memberi kepuasan tersendiri. Melalui berdagang mereka merasakan lebih santai seakan rekreasi atau sekedar hobi bertransaksi dengan pembeli.

Dalam penjelasan Ratna Saptari (1997:382) diungkapkan bahwa pedagang dapat diklasifikasikan menurut kepemilikan modal, yaitu: 1) pedagang yang memiliki tempat usaha di pasar atau di rumah sendiri; 2) pedagang perantara yang membeli barang di pasar induk yang selanjutnya dijual kepada pedagang di pasar yang lebih kecil atau ke warung-warung sepanjang jalan yang dilaluinya. Pedagang perantara tidak perlu modal untuk memulai usaha sebab barang dapat dibayar setelah laku terjual.

Temuan penelitian Lessinger di India Selatan yang ditulis dalam Ratna Suptari

(1997: 383) mengungkapkan bahwa dalam hierarki perdagangan terdapat empat tingkat pedagang, yaitu; (1) pedagang besar (*wholesaler*) yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsen; (2) pedagang perantara yaitu pedagang yang membeli barang dari pedagang besar kemudian dijual kepada pedagang kecil atau langsung kepada konsumen; (3) pedagang kecil yaitu pedagang yang bergantung pada pedagang perantara dan menjual barang-barang yang membutuhkan modal yang kecil; (4) kaum perempuan pedagang yang menjalankan usaha dagangannya memiliki keterbatasan dalam berhubungan dengan pedagang perantara yang pada umumnya laki-laki dan tidak memiliki kepercayaan dari pedagang besar sehingga sulit memperoleh bantuan kredit. Hasil penelitian tersebut sangat jelas memberi gambaran betapa kaum perempuan tidak memiliki kesempatan untuk

dapat hidup lebih baik. Meskipun ingin berusaha tetap saja tidak diberi kepercayaan. Sehingga ketidakberdayaan mereka dapat disebabkan dari dalam dirinya sendiri terlebih dari lingkungannya.

Pedagang pada sektor informal salah satunya adalah pedagang asongan. Istilah pedagang asongan memiliki arti sebagai pedagang yang menawarkan barang dagangan dengan cara menyodorkan kepada pembelinya. Menurut Budiyono (1997:9) bahwa istilah asongan berarti sesuatu barang yang disodorkan kepada orang lain dengan harapan supaya orang tersebut membeli barang yang disodorkan kepadanya. Berdagang asongan merupakan aktivitas dagang dengan cara menawarkan barang kepada calon pembeli yang dilakukan ditempat umum atau tempat lain yang memungkinkan untuk dijalankan.

Selanjutnya menurut Budiyono (1997:9) bahwa beberapa karakteristik yang ada pada pedagang asongan yaitu:

- 1). Biasanya menjual barang-barang yang tidak mudah busuk serta ringan dibawah. Barang tersebut seperti rokok, korek api, tissue, permen, dan air minum kemasan.
- 2). Berdagang asongan merupakan aktivitas yang menjalankan fungsi pengecer sejati. Sekecil apapun jumlah barang yang diinginkan oleh pembeli, pedagang asongan akan tetap melayani.
- 3). Aktivitas berdagang dilakukan dengan berjalan kaki. Menawarkan barang dagangan kepada orang yang berlalu lalang karena tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
- 4). Mereka sangat pandai mencari pembeli dan merayu dalam menawarkan barang dagangannya.

- 5). Modal usaha yang digunakan berdagang termasuk kecil sehingga mereka berjualan atas dasar tunai.
- 6). Bagi yang tidak mempunyai modal biasanya menjual barang yang diperoleh dari juragan. Setelah laku baru akan mendapatkan komisi menurut jumlah harga barang yang laku terjual.[]

8 Epilog

Pada kenyataannya telah terjadi perubahan dari waktu ke waktu, baik urusan internal keluarga sampai urusan eksternal, maupun dalam masyarakat. Berbagai macam proses perubahan yang terjadi dalam keluarga, salah satunya adalah perubahan peran dalam keluarga. Pemahaman masyarakat pada umumnya selama ini bahwa laki-laki adalah tulang punggung ekonomi keluarga, sebagai pencari nafkah yang utama, sekarang sudah tidak dapat lagi menjadi sesuatu yang berlaku umum. Sebab banyak

perempuan yang dapat dijumpai dalam masyarakat yang juga mampu berperan sebagai pencari nafkah. Boleh jadi penghasilan yang diperoleh lebih besar dari penghasilan suaminya. Atau mungkin menjadi penghasilan satu-satunya untuk menghidupi keluarga, terutama bagi perempuan yang menjalankan peran sebagai *single parent*.

Perempuan yang bekerja sebagai pedagang asongan di Pelabuhan Parepare pada umumnya adalah ibu rumah tangga. Perempuan pedagang asongan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah yang berstatus isteri dan ibu rumah tangga, *single parent* dan juga ada yang masih lajang. Kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan mereka mencari penghasilan tambahan, meskipun ada di antara mereka yang penghasilannya sebagai penopang ekonomi yang utama bagi keluarganya.

Berbagai keterbatasan yang dimiliki yang menyebabkan pedagang asongan harus memiliki kemampuan melakukan strategi ketika menjalankan usahanya. Terutama dalam hal kepemilikan modal yang sedikit serta kekuatan fisik yang mesti diperhatikan karena sangat menunjang mereka menjalankan usahanya. Juga dibutuhkan kemampuan membangun kerja sama serta kebersamaan terutama dengan sesama pedagang asongan.

Berbagai strategi yang dilakukan yang berkaitan dengan pekerjaan perempuan pedagang asongan yaitu strategi bertahan menjalankan usaha, strategi penetapan harga, strategi pemasaran, strategi pengorganisasian diri dalam kelompok, dan juga strategi yang dilakukan ketika berinteraksi dengan orang-orang di pelabuhan tempat mereka berdagang asongan.

Diawali dengan bekerja sebagai pedagang kaki lima. Karena penghasilannya dirasakan kurang dan ada peluang dapat menjadi pedagang asongan yang menyebabkan perempuan yang berdagang di pelabuhan banyak yang bekerja sebagai pedagang asongan. Mereka lebih memilih sebagai pedagang asongan dari pada berdagang kaki lima karena penghasilan yang diperoleh lebih banyak. Dua jenis pekerjaan tersebut dengan mudah dapat saling di pertukarkan karena memiliki fleksibilitas dan perempuan yang menjalankannya dapat dengan mudah mengadaptasikan diri pada dua jenis pekerjaan tersebut.

Mobilitas okupasi yang dilakukan oleh perempuan yang berdagang asongan terjadi tanpa ada perubahan derajat kedudukan karena masih berada pada kedudukan yang sama. Gerak perubahan terjadi secara horizontal. Sehingga akan dilakukan

penelusuran yang lebih mendalam guna memperoleh pemahaman mengenai mobilitas okupasi yang dialami oleh perempuan pedagang asongan di pelabuhan Parepare.

Ketika menjalankan aktifitasnya berdagang asongan, dapat dipastikan bahwa perempuan yang mengasong dagangannya akan berinteraksi dengan berbagai orang yang memiliki latar belakang yang beragam. Perempuan pedagang asongan sering mendapat perlakuan yang tidak wajar karena dilihat sebagai mahluk yang lemah. Hal ini yang perlu mendapat perhatian dari aparat yang terkait untuk memberi jaminan keselamatan kerja serta perlindungan yang senantiasa mereka butuhkan sepanjang melakukan aktifitas berdagang.

Terlalu banyak waktu yang mereka gunakan untuk menjalankan tugasnya dalam rumah tangga serta menggunakan waktu yang banyak untuk mencari nafkah sehingga dapat

menjadi kendala bagi mereka karena kurang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dirinya. Selain kendala yang lain terutama keterbatasan kepemilikan modal usaha.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Irwan. DR. Ed. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta. Pusat Penelitian Kependudukan.UGM.
- Agusyanto Ruddy. 2007. *Jaringan Sosial dalam Organisasi Jakarta*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Agusyanto, Ruddy. 2007. *Jaringan Sosial Dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Amitai Etzioni. 1968. *The Active Society: a Theory of Societal and Political Process*. Collier McMillan. London.
- Aris Ananta. 1995. *Transisi Demografi, Transisi Pendidikan, dan Transisi Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan BKKBN.
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dubeck J. Paula and Borman Kathryn. Ed. 1997. *Women and Work*. New Brunswick. New Jersey. Rutgers University Press.

- Dwiyanto, Agus, dkk. 1996. *Penduduk dan Pembangunan*. Yogyakarta. Aditya Media.
- Effendi Tadjuddin Noer. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya.
- Ihromi TO. 1995. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Ivan A. Hadar. 1997. *Feminism, Feminis Laki-Laki dan Wacana Gender Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat*.
- Jones PIP. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial. Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Kardinah, Roestam Soepardjo. 1993. *Wanita, Martabat Dan Pembangunan*. Jakarta. CV. Guna Aksara.
- Lee Everet S. 1995. *Teori Migrasi. Pusat Penelitian Kependudukan*. Yogyakarta. UGM.
- Manning Chris & Effendi Noer Tadjuddin. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan*

Sektor Informal Di Kota. Jakarta Yayasan
Obor Indonesia.

Mantra Ida Bagoes. 1995. *Mobilitas Penduduk
Sirkuler dari Desa ke Kota Di Indonesia.*
PPK UGM. Yogyakarta.

Maria E. Pandu. 2006. Gender di Tanah
Mandar (Studi Kasus Kesetaraan dan
Kemitraan Terpadu Pada Komunitas
Nelayan di Lingkungan Ranggah Barat
Kelurahan Tatoli Kecamatan Banggae
Kabupaten Majene. *Disertasi Doktor.*
Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

MuasTuty R & Witanto P. Eddy. 2005.
*Aktualisasi Peran Wanita Cina di
Jabodetabek.* Dalam Makara Sosial
Humaniora. Volume 9. No. 2. FIPB. UI.
Depok.

Muta'ali Lutfi. 2001. *Peranan Wanita Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Studi
Kasus Pola Ruang Belanja Wanita Di
Kompleks Perumahan Daerah Pinggiran
Kota.* Proyek Pengkajian dan Penelitian
Ilmu Pengetahuan Terapan (P2LTP)
Untuk Penelitian Studi Wanita. DITJEN
DIKTI. DepDikNas.

- Narwoko Dwi & Suyanto Bagong. 2007. *Sosiologi Teks Terapan Dan Pengantar*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Nasikun. 2007. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazzir, Nasrullah. 2009. *Teori-Teori Sosiologi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Ollenburger C. Jane & Moore H. Helen (1996). *Sosiologi Wanita*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Pitoyo Agus Joko. 1999. *Pedagang Kaki Lima Pada Masa Krisis. Bukti Kebijakan Kependudukan*. Yogyakarta. PPK. UGM.
- Raho Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Ritzer, George. 2007. *Teori Sosiologi – Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer George – Goodman J. Douglas. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Kencana Prenada Media group.
- Ritzer George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta. Rajawali Press.

- Saptari Ratna. & Holzner Brigitte. 1997. *Perempuan, Kerja Dan Perubahan Sosial. Sebuah Pengantar Studi Perempuan.* Jakarta. PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Setiadi. 2011. *Masalah Reintegrasi Sosial dan Ekonomi Migran Kembali.* Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan Volume 10 No. 2. Yogyakarta. PPK. UGM
- Setiadi M. Elly, dkk. 2011. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar.* Jakarta. Kencana Prenada Media group.
- Smith Bonnie G. Ed. 2004. *Women's History In Global Perspective. Volume 1.* USA. American Historical Association.
- Sukidin. 2009. *Sosiologi Ekonomi.* Jember. Center for Society Studies. (CSS).
- Sulaeman, Munandar, dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan.* Bandung: Aditama.
- Supardan Dadang. 2008. *Pengantar Ilmu Sosial. Sebuah Kajian Pendekatan Struktural.* Jakarta. Bumi Aksara.

- Suryochondro Sukanti. 1984. *Potret Pergerakan Wanita Di Indonesia*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Suyanto, Bagong dan Septi Ariadi. 2007. "Interaksi dan Tindakan Sosial" dalam Dwi J. Narwoko dan Bagong Suyanto (Ed.) *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Prenada Group.
- Suyanto, Bagong. 2011. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Sztompka Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta. Prenada Media.
- Tarigan Herlina. 2001. *Orientasi Nilai Kerja Pemuda Pada Keluarga Petani Perkebunan. Studi Kasus Pada Masyarakat Sukajember. Kecamatan Sukanegara Kabupaten Cianjur*. Jawa Barat. Bogor. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Todaro P. Michael, 1996. *Kajian Ekonomi Migrasi Internal Di Negara Berkembang*. Yogyakarta. PPK. UGM.

Walter Buckley. 1967. *Sociology and Modern System Theory*. Prentice Hall.

Winardi E, 2007. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Tarsito.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Asmirah
Tempat dan Tanggal Lahir : Parepare, 1 Juli 1964
NIP/NIDN : 196407011990032002 /
0001076404
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I / IV-b
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : Doktor (S3) Sosiologi
Alamat Rumah Suren : BTN Bulurokeng Permai G3/20
asmirah.bosowa@gmail.com
No. Kontak : 082320142214
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Bosowa Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar
Anak : Muhammad Syaukad

B. PENDIDIKAN FORMAL

SD	1975, di Kota Parepare
SMP	1979, di Kota Parepare
SLTA	1982, di Kota Parepare
S1	1987, Jurusan Antropologi Univ. Hasanuddin
S2	1999, Prodi Kependudukan dan Pengembangan SDM PPs. Universitas Hasanuddin
S3	2017, Prodi Sosiologi PPs. Universitas Negeri Makassar

C. PENGALAMAN KERJA

1. Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Sospol Universitas 45 Makassar, tahun 1992-1993
2. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar, tahun 1993-1999
3. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar, tahun 2000-2003
4. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar, tahun 2003-2007
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar, tahun 2007-2009
6. Pembina Pramuka Gugus Depan Puteri Universitas 45 Makassar, tahun 1995-1996
7. Pengurus Pusat Kajian Gender Universitas 45 Makassar, tahun 2005-2009.
8. Pengurus Majelis Taklim Syuhada 45 Makassar, tahun 2002-2007
9. Pengurus Unit Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, tahun 2007

D. KARYA TULIS

Penelitian/Jurnal

1. Kelompok Kerja dan Sistem Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, 1987.
2. Wanita Pekerja pada Sektor Pertanian Di Kabupaten Sidenreng Rappang, 1999.
3. Pemberdayaan Wanita Sebagai Pekerja Pada Sektor Publik dan Domestik, Jurnal Teknologi Kerumahtanggaan. Fakultas Teknik UNM Vol. 7 No. 1 ISSN : 1907-5081.
4. Angkatan Kerja Perempuan pada Sektor Informal di Perkotaan Jurnal Teknologi Kerumahtanggaan Fakultas Teknik UNM Vo. 11 No.1 ISSN: 1907-5081

Jurnal Internasional

1. Diversification of Woman Job at Informal Sector In Parepare Nusantara Harbour. Macrothink Institute. Journal of Sociological Research. Vol. 4 No. 2 (2013) ISSN : 1948 – 5468.
2. Woman Migrants as informal Traders In The Port of Parepare. International Journal of Academic Research Vol.7 No.3 (2015) ISSN: 2075-4124

E. Pengabdian Pada Masyarakat :

- 1, Penyuluhan Tentang Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Lero Kabupaten Pinrang pada tanggal 13 Agustus 2008
- 2, Penyuluhan tentang Pola Asuh Anak dalam Menyongsong Masa Depan yang lebih Baik Di Desa Lero Kabupaten Pinrang Pada tanggal 11 April 2009
- 3, Penyuluhan tentang Peran Serta Masyarakat sebagai Agen Perubahan untuk Pembangunan Pertanian Pedesaan Desa Tallungura Kabupaten Enrekang Pada tanggal 8 Mei 2013

F. PELATIHAN

1. Pelatihan Pembelajaran Soft Skill dalam Konteks Kurikulum Berbasis Kompetensi 2007
2. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah 2008
3. Pelatihan Pengukuran Tes dan Penilaian Hasil Belajar Dosen PTS Kopertis Wilayah IX Sulawesi 2008
4. Workshop Peningkatan Kualitas Proposal Penelitian Tahun 2012 2012
5. Pentaloka Pengembangan Kurikulum dan Peningkatan Kemampuan Pengajar Kependudukan pada PTN dan PTS Kawasan Timur Indonesia 2004
6. Penataan Pembimbing Lapangan Mahasiswa KKN Terpadu Se Sulawesi Selatan 1998
7. Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar 2007
8. Pelatihan Perancangan Media Pembelajaran dalam Konteks Multimedia 2007
9. Peserta Seminar “Menapak jejak-Jejak Perempuan Pejuang Sulawesi Selatan” 2006
10. Peserta Seminar “Prospek Hubungan Bilateral RI-Afrika Selatan Tantanga dan Peluang Bagi Kepentingan Indonesia

- | | | |
|-----|---|------|
| 11. | Seminar Nasional tentang “Prospek Mahkamah Agung dalam Era Reformasi” | 2007 |
| 12. | Seminar Nasional tentang Perlindungan WNI Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan sebelah Utara Australia | 2005 |
| 13. | Seminar Nasional tentang Peranan Pemuda dalam meningkatkan Kerjasama Developing Eight (D-8) | 2005 |
| 14. | Seminar Nasional tentang Peranan Pemuda dalam Pembangunan Bangsa | 2011 |
| 15. | Seminar Nasional tentang Konstruksi Arsitektur dan Sosial Masyarakat Makassar | 2016 |
| 16. | Seminar Internasional tentang The American Justice System oleh Hakim Ketua Pengadilan Los Angeles Amerika Serikat Di Makassar | 2011 |

G. PERJALANAN LUAR NEGERI

1. Kualalumpur (Malaysia)
2. Manila (Filipina)
3. Jeddah/Madinah/Mekkah (Ibadah Haji)
4. Sidney (Australia)
5. Brisbane (Australia)
6. Toowomba (Australia)
7. Gold Cost (Australia)
8. Mengikuti Program Pendidikan Sandwich, program Language and Culture at University of Saothern Queensland tahun 2008-2009. Toowomba Australia.